

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
DAMPAK PEMEKARAN DESA BAGI MASYARAKAT**  
(Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh**

**M. Arif Hidayatullah**  
**NPM. 1421020096**

**Jurusan : Siyasah Syar'iyah**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1440 H/2018M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
DAMPAK PEMEKARAN DESA BAGI MASYARAKAT**  
(Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**M. Arif Hidayatullah**  
**NPM. 1421020096**

**Jurusan : Siyasah Syar'iyah**

**Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H, M.H.**

**Pembimbing II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1440 H/2018M**

## ABSTRAK

Sejak berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, memberikan semangat baru dalam meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat proses pembangunan dengan mengedepankan semangat partisipasi masyarakat dengan mewujudkan pemerintahan desa yang proposional efesiens dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab, pemerintahan desa diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat di desa dengan mengutamakan peraksara desa, hak asal usul dan adat istiadat di desa.

Desa Sidomekar merupakan salah satu dari beberapa desa yang merupakan desa pemekaran, kemajuan suatu desa tentu tidaklah lepas dari faktor-faktor pendukung, dalam hal ini adalah peran dan pengawasan kepala desa, serta masyarakat yang sangat penting dalam kemajuan desa. Desa sidomekar merupakan sebuah desa baru yang mengalami pemekaran dengan dampak yang beragam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana Perubahan yang terjadi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang? dan bagaiman dampak pemekaran Desa bagi masyarakat Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang?, serta Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dampak pemekaran Desa bagi masyarakat Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan yang terjadi di Desa Sidomekar dan dampak pemekaran yang terjadi setelah dimekarkan serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dampak pemekaran Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa, Perubahan yang terjadi di desa sidomekar yakni memberikan semangat kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan surat-surat serta akta kelahiran dikarenakan mudahnya pengurusan serta adanya sosialisasi terhadap masyarakat desa dan perosdur serta layanan lebih efesian karena jumlah penduduk desa yang seimbang sehinga pelayanan lebih cepat sehingga masyarakat puas dalam pelayanan. Dampak Pemekaran Desa yang terjadi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang telah memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat yang dilihat dari beberapa indikator yakni, Sistem/Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Sarana dan Prasarana dan Kompetensi Pelaksana. Menurut hasil penelitian, pemekaran yang terjadi pada Desa Sidomekar sangat berdampak positif bagi masyarakat

yang ada di sana, karena membawa perubahan yang lebih baik apabila dibandingkan pada saat sebelum pemekaran. Dengan kata lain, pemekaran Desa Sidomekar ini telah memenuhi harapan segenap masyarakat Desa Sidomekar yang menginginkan sebuah pelayanan yang berkualitas.serta sesuai dangan undang-undang desa no 6 tahun 2014 serta sesuai dengan hukum islam yang mana sesuai dengan piagam madinah serta al-quran suran anisa 58.







**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703531,780421*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

**Nama Mahasiswa : M. Arif Hidayatullah**

**NPM : 1421020096**

**Jurusan : Siyasah Syar'iyah**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TERHADAP DAMPAK PEMEKARAN  
DESA BAGI MASYARAKAT (Studi di Desa  
Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten  
Tulang Bawang)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas  
Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. H. Haryanto H., M.H**

**NIP. 195612051983031002**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Jayusman, M.Ag**

**NIP. 197411062000031002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah**

**Drs. Susiadi AS., M.Sos.I**

**NIP. 195808171993031002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703531, 780421*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DAMPAK PEMEKARAN DESA BAGI MASYARAKAT (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)**, Disusun oleh: **M. Arif Hidayatullah, NPM: 1421020096**, Jurusan: **Siyasah Syar'iyah**. Telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada hari/tanggal: **Jum'at, 30 November 2018**.

**TIM PENGUJI**

Ketua : **Drs. Susiadi AS., M.Sos.I**

Sekretaris : **Fathul Mu'in A.H.I., M.H.I**

Penguji I : **Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**

Penguji II : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

Dekan

Fakultas Syari'ah



**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP.197009011997031002**



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. An-Nisa : 58)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabunnuzul dan Hadits Sahih*, (Jakarta:SYGMA, 2010), h. 78

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan cinta kasih yang tulus teruntuk:

1. Yang terhormat dan sangat kubanggakan kedua orang tuaku tercinta bapakku Mukson dan Ibu Dina yang telah memberikan kasih sayang yang tidak terbatas serta telah ikhlas mendidik, memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan, terima kasih atas semua pengorbanan baik materil maupun non materi yang telah diberikan.
2. Adik-adik tersayang yang selalu memberikan dukungan penuh atas pendidikanku.
3. Dan almamaterku tercinta Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung beserta staf-stafnya yang telah melayani dengan baik.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama M. Arif Hidayatullah lahir di Bandar Lampung pada tanggal 11 Desember 1995, sebagai anak ke 1 (pertama) dari 3 (tiga) bersaudara buah cinta dari pasangan ayahanda Mukson dan ibunda Dina

Pendidikan formal ditempuh pada tahun 2002 di SD Negeri 1 Tunggal Warga Tulang Bawang dan lulus tahun 2007, Kemudian pada tahun yang sama penulis menempuh pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama di PONPES Al-Fatah Natar, selesai pada tahun 2010 Selanjutnya penulis melanjutkan ketingkat pendidikan menengah atas di SMAN 1 Penawar Tama Tulang Bawang, lulus pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Siyasah pada Fakultas Syariah

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti berbagai seminar/pelatihan yang diadakan di dalam kampus UIN maupun di luar kampus.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai akhir zaman.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa bimbingan dan bantuan ketersediaannya fasilitas, skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih sebesar-besarnya kepada Allah swt, yang telah memberikan kesempatan dapat belajar dan terus belajar serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Drs. Susyadi AS, M.Sos.I. Selaku Ketua jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Drs. H. Haryanto H, M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dr. H. Jayusman, M.Ag. Selaku pembimbing II yang selalau memberikan masukan, saran, dan bimbingan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.



5. Pimpinan beserta staf perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan data, dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Aparatur pemerintahan Desa Sidomekar Ke. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, yang sudah memberi kesempatan kepada penulis untuk Melakukan Penelitian.
7. Sahabat-sahabatku angkatan Tahun 2014 serta rekan-rekan mahasiswa yang ikut membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah swt senantiasa membalas jasa dan kebaikan pada semua pihak yang telah membantu serta mendoakan sampai terselesaikannya skripsi ini. Amin Yaa Robbal'alamin.

Bandar Lampung, September 2018

**M. Arif Hidayatullah**  
NPM. 1421020096

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	11

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pemekaran Desa dalam Hukum Islam .....	15
1. Pemekaran atau Perluasan Wilayah dalam Islam .....	15
2. Pemerintahan Daerah dalam Islam .....	18
3. Tugas dan Wewenang Pemerintahan Daerah Dalam Islam....	24
B. Konsepsi Dasar Pemekaran Desa dalam Hukum Positif .....	26
1. Pengertian Desa .....	26
2. Pengertian Pemekaran Daerah/ Desa.....	28
3. Syarat-Syarat Pemekaran Desa.....	30
4. Faktor-Faktor Pemekaran Desa.....	30
5. Tujuan Pemekaran Desa .....	32
6. Prosedur Pemekaran Desa.....	32
7. Bentuk-Bentuk Pemekaran Desa .....	33
8. Dampak Pemekaran Desa .....	33



### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian .....	37
B. Kondisi Desa SidoMekkar Sebelum Pemekaran .....	45
C. Dampak Pemekaran Desa Sidomekar.....	50

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Perubahan yang terjadi di Desa Siomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang .....	61
B. Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat Desa Siomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.....	68
C. Tinjau Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.....	70

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	38
2. Luas Wilayah Desa Sidomekar .....	38
3. Tingkat Pendidikan .....	39
4. Lembaga Pendidikan.....	40
5. Jumlah Pemeluk Agama.....	40
6. Tempat Ibadah.....	41
7. Mata Pencaharian Penduduk .....	41
8. Pembagian Wilayah Desa .....	42
9. Lembaga Kemasyarakatan .....	42
10. Masalah Dan Potensi Desa Sidomekar .....	43



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1** Surat Permohonan Riset

**Lampiran 2** Surat Keterangan Riset

**Lampiran 6** Naskah UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang skripsi ini dan agar tidak menimbulkan kesalah pahaman penafsiran pada judul di atas, maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat”** (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang). Dari judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut:

Tinjauan adalah tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari).<sup>1</sup>

Hukum Islam. Sedangkan hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam.<sup>2</sup>

Hukum Positif. "kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia."<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). h. 1211

<sup>2</sup>Fathurrahman Djami, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). h. 12

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.* h. 1255



Pemekaran desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Masyarakat sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial.<sup>5</sup>

Desa Sidomekar merupakan desa pemekaran ataupun pengembangan dari Desa Sido Mukti dan Desa Makarti Tama yang terletak di Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten tulang Bawang.

Dari penjelasan yang telah di uraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa judul ini akan melihat Pandangan Hukum berlandaskan hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemekaran Desa Bagi Masyarakat di Desa Sidomekar.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih dan membahas judul ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Kajian tentang Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat di Desa Sidomekar sangatlah penting karena sesuai dengan perkembangannya,

---

<sup>4</sup> Team redaksi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Inonesia (Undang-unang Desa Kelurahan dan Kecamatan)*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2014), h. 3

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonsia*, (Jakarta: balai pustaka, 2007), h. 393

sebelum adanya pemekaran, desa tersebut kurang maju namun setelah adanya pemekaran, kondisinya berubah semakin maju.

- b. Kajian tentang tinjauan Hukum Islam dan hukum positif perlu dibahas karena dapat mengetahui dan memahami dampak pemekaran desa menurut pandangan Hukum Islam dan hukum positif di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan judul ini.
- b. Objek kajian ini sesuai dengan kesyari'ahan khususnya Jurusan Siyasa

## C. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan dalam Islam dikenal sebagai *Ulil Amri* yang secara bahasa berarti pemimpin, hal ini sesuai dengan Al-qur'an surat An-nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.*<sup>6</sup>

Kata *Ulil Amri* disini diartikan sebagai pemimpin atau yang dikenal juga dalam islam sebagai *Imam* atau *Khalifah*. Selaku kepala pemerintahan tentu *Ulil Amri* atau *Imam* memiliki tanggung jawab ataupun kewajiban yang harus

<sup>6</sup> Depag RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART) 2004, h.



dijalankan sebagai bentuk keamanahannya. Diantara bentuk kewajibannya adalah sebagai mana yang telah di kemukakan Al-Mawardi yaitu :

1. Memlihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf
2. Mentanfidzkan Hukum-hukum diantara orang yang bersengketa.dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memlihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim
6. Memerangi orang yang menenentang islam setelah dilakukan dkawah dengan baik-baik namun mereka menolak, dan tidak pula menjadi kafir dzimmi
7. Memungut fay dan sedekah-sedekah tanpa rasa ragu
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan daoat dilaksanakan oleh orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.<sup>7</sup>

Tugas ataupun kewajiban di atas berlaku secara umum, artinya berlaku bagi kepemimpinan secara vertikal. Secara eksplisit teretra didalamnya berlaku bagi kepemimpinan tertinggi sampai terendah, mulai dari kepala negara, sampai yang paling rendah kepala desa. Kendatipun tak dituliskan tugas bagi masing-masing tingkatan kepemimpinan tersebut. Hal diatas jika disambungkan dengan kewajiban Pemimpin Negara Kesatuan Republik

---

<sup>7</sup> H.A Dzajuli, *Fiqh Sioyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) 2003, h. 62

Indonesia akan sangat berkesinambungan. Sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang secara jelas tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 alenia ke-4 yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencederaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
5. Menjaga ketertiban masyarakat adalah tugas seluruh rakyat bersama aparaturnegara dalam hal ini adalah POLRI, TNI, BIN dan lain-lain.<sup>8</sup>

Kesemuanya memang menjadi tanggung jawab negara namun, tentu dalam pelaksanaan atau pelaksana tugas tersebut adalah pemerintah selaku pimpinan negara. Dan pemerintah disini memiliki arti keseluruhan pemerintahan baik daari tertinggi maupun terendah sama seperti tugas Pemerintahan menurut Hukum Islam.

Semuanya dari pemerintahan paling tinggi sampai rendah memiliki tugas yang sama secara umum namun berbeda-beda dalam Tugas Pokok dan Fungsinya. Tapi tetap mereka memiliki peran yang sama-sama penting, bahkan bagi pemerintahan paling rendah sekalipun semacam pemerintahan desa. Pemerintahan desa menjadi sangat penting mengingat pemerintahan Indonesia tidak lagi menganut pemerinthan terpusat, tetapi pemerintahanan otonom atau otonomi daerah. Tanpa adanya pemerintahan desa, pemerintahan tertinggi atau pusat tidak akan mampu melaksanakan tugasnya.

Pemerintahan desa sendiri terdiri atas, kepala Desa yang dipilih melalui Pemilihan kepala Desa setiap 5 tahun sekali, dan dibantu oleh perangkat desa.

---

<sup>8</sup>H.A Dzajuli, *Op.cit.* h. 69



Perkembangan tentang desa sudah bergulir dan berjalan sejak tahun 1979, pada masa orde baru, dengan diterbitkannya UU Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Lalu secara dinamis mengalami perubahan dan perbaikan, puncaknya pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan UU No. 6 tahun 2014. Di dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal I ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, ditegaskan bahwa : “Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan terbitnya Undang Undang ini maka payung hukum untuk masyarakat desa semakin kuat dibandingkan dengan Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 maupun Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, pada Undang Undang Nomor 32 tahun 2014 ini juga diterbitkan tentang alokasi dana desa berikut besaran dananya mencapai 1 milyar, sehingga UU ini menjadi salah satu UU desa yang mutakhir. Sejak berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, memberikan semangat baru dalam meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat proses pembangunan dengan mengedepankan semangat partisipasi masyarakat dengan mewujudkan pemerintahan desa yang proposional efesiens dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab, pemerintahan desa diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan

pemberdayaan masyarakat di desa dengan mengutamakan prakarsa desa, hak asal usul dan adat istiadat di desa. Dengan adanya suatu kewenangan tersebut tentu menimbulkan sisi positif dan sisi negatif sehingga dengan kemungkinan adanya wacana pemekaran desa menjadi agenda di beberapa daerah. Pembentukan desa sesuai dengan pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 8 dilakukan dengan pembentukan desa persiapan yang merupakan bagian dari wilayah desa induk dan statusnya dapat ditingkatkan dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun berdasarkan hasil evaluasi.

Pertumbuhan jumlah desa dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang memiliki efek dikeluarkannya undang-undang desa. Tujuan utama pemekaran desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mudahnya pelayanan publik. Desa Sidomekar merupakan salah satu dari beberapa desa yang merupakan desa pemekaran, kemajuan suatu desa tentu tidaklah lepas dari faktor-faktor pendukung, dalam hal ini adalah peran dan pengawasan kepala desa, serta masyarakat yang sangat penting dalam kemajuan desa. Namun kepala Desa lah yang memiliki peran utama dan tanggung jawab karena kepala desa memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai penyelenggara pemerintahan desa, serta berhak mengatur desa demi terlaksananya dan tercapainya kemajuan desa serta kesejahteraan masyarakat dan masyarakatpun harus ikut mendukung dan berpartisipasi didalam pembangunan desa sehingga tercapainya tujuan pemekaran desa, pengambilan daerah tersebut bahwa desa sidomekar merupakan sebuah desa baru yang mengalami pemekaran dengan dampak yang beragam dalam hal ini akan



difokuskan pada dampak positifnya. Dengan menyertakan tinjauan hukum Islam sebagai salah satu kajian utama, mengingat bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* begitu juga dengan perangkat di dalamnya termasuk hukum Islam.

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis bermaksud mengkaji dan meneliti tentang Dampak Dari Pemekaran Desa Di Desa Sidomekar dalam sebuah Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat Di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perubahan yang terjadi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang ?
2. Bagaimana dampak pemekaran desa bagi masyarakat Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dampak pemekaran desa bagi masyarakat Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang?

#### **E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan perubahan yang terjadi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Untuk menjelaskan dampak pemekaran desa bagi masyarakat yang bertujuan untuk kemajuan Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.
- c. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dampak pemekaran desa bagi masyarakat Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai berbagi ilmu kepada para pembaca untuk mengetahui Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat.
- b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat Ujian Akhir Semester dan menyelesaikan studi Fakultas Syari'ah.

## F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam

suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan,<sup>9</sup> karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian di lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksi dengan lingkungan.<sup>10</sup> Di sini penulis akan terjun langsung ke lapangan di mana penulis akan meneliti bagaimana dampak pemekaran desa bagi masyarakat di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru.

### b. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif (menggambarkan/menjabarkan) analisis, yakni penelitian menguraikan dan menjelaskan data yang telah ada. Data-data yang dapat diambil selanjutnya digunakan sebagai rujukan dengan proses analisis secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Bentuk penelitian ini yaitu studi analisis kritis, analisis kritis adalah penelitian yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang dampak

---

<sup>9</sup>Joko Subgyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 2

<sup>10</sup>Elta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*, (yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 21



pemekaran desa bagi masyarakat di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru.

## 2. Data dan Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, dan merupakan sumber dasar dari bukti atau saksi utama dari peristiwa tertentu.<sup>11</sup> Data primer ini didapatkan dari hasil dokumentasi, wawancara, dan hasil observasi terhadap masyarakat dan Kepala Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjelaskan bahan hukum primer.<sup>12</sup> Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan seperti alquran dan hadits serta undang undang desa nomor 6 tahun 2014 serta kompilasi hukum islam sebagai bahan hukum primer dan buku buku yang berkaitan dengan dampak pemekaran desa bagi Masyarakat di Desa Sidomekar.

## G. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan tehnik pngumpuln data sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Abdul qodir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014). h. 50

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 1998 ).h 114

### 1. Wawancara(*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Sedangkan untuk tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dimana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti. Wawancara tersebut yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dampak Pemekaran Desa di Desa Sidomekar, yang didapatkan dari masyarakat dan Kepala Desa Sidomekar.

### 2. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, rekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum dilokasi.<sup>13</sup> Dalam hal ini penilitan dilakukan di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau interview hal-hal berupa catatan, buku, agenda, surat kabar, dan sebagainya.<sup>14</sup> Metode ini penulis gunakan dalam memperoleh data tentang Demografis dan Geografis Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang mengenai dampak pemekaran desa bagi masyarakat.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 85

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 274

## H. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data sudah terkumpul berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data tersebut dan di proses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera di persiapkan untuk keperluan berikutnya.

### b. Koding

Koding adalah usaha untuk membuat klasifikasi terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diproses untuk mengetahui, apakah data-data yang telah diproses sesuai atau tidak.<sup>15</sup>

### c. Sistematisasi

Sistematisasi adalah penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>16</sup> Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

## I. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta dan peristiwa yang konkret dari fakta-fakta atau peristiwa peristiwa yang khususnya itu ditarik

<sup>15</sup> Koentjaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm.29.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.29.



generalisasi yang bersifat umum.<sup>17</sup> Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisis, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Didalam analisis data penulis akan mengemukakan data data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan lapangan. Data data tersebut selanjutnya akan diolah dengan baik oleh penulis, lalu akan diadakan pembahasan dan pengkajian terhadap masalah masalah yang berkaitan.



---

<sup>17</sup> Sutrisnos Hadi, *Metodologi research, jilid I*, (yogyakarta: penerbit fakultas psikologi UGM, 1983), h. 80

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemekaran Daerah (Desa) dalam Islam**

##### **1. Pemekaran atau Perluasan Wilayah dalam Islam**

Pemekaran wilayah atau perluasan wilayah (ekspansi) menurut Zainul Bahir bahwa ekspansi yaitu memperluas negara sendiri atau daerah sendiri dengan jalan menduduki wilayah negara lain.

- a. Pemekaran atau perluasan wilayah dalam Islam yaitu pada masa Khalifah Rasyidin yang mana pada masa Umar ibn al Khathab yang paling menonjol dalam perluasan wilayah.

Setelah dilantik menjadi khalifah atau kepala negara Umar segera melaksanakan tugas tugas kenegaraan. Secara prinsip Umar melanjutkan garis kebijaksanaan yang telah ditempuh Abu Bakar.

Namun karena permasalahan yang dihadapi Umar seiring dengan perluasan daerah Islam, Umar melakukan berbagai kebijaksanaan yang antisipatif terhadap perkembangan dan tantangan yang dihadapinya.

Kebijaksanaan yang dilakukan Umar sebagai kepala negara meliputi pengembangan daerah kekuasaan Islam, pembenahan birokrasi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pembentukan tentara reguler yang digaji oleh negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Fiqih Siyasah *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag Cetakan ke 1, Oktober 2014 Hal 63

Selama sepuluh tahun pemerintahan Umar (634-644M), kekuasaan Islam telah melebar sayapnya melampaui Jazirah Arab. Penaklukan demi penaklukan dilakukan pada masa Umar, bahkan dua adidaya ketika itu. Persia dan Bizantium berhasil jatuh ketangan umat Islam, pada 635 M, Tentara Islam di bawah pimpinan Khalid ibn Walid berhasil menaklukan Damaskus, setahun kemudian setelah tentara Bizantium mengalami kekalahan, pada perang Yarmuk, Peraktis seluruh wilayah Syiria berhasil dikuasai oleh umat Islam pada tahun 637. Di bawah pimpinan panglima perang Saad Ibn Abi Waqqas, Irak berhasil pula dikuasai oleh umat Islam menjelang khalifah Umar wafat. Pada tahun 639M, dibawah komando Amr ibn al Ash, Mesir berhasil pula menghancurkan imperium Persia. Pada tahun berikutnya, 641 M, Palestina yang dikuasai Bizantium jatuh ketangan Islam. Kota Yarusalem yang didalamnya terletak Baitul Maqdis merupakan yang terakhir jatuh ke tangan Islam secara damai. Adalah Umar sendiri yang datang kesana untuk menandatangani perjanjian damai tersebut.<sup>2</sup>

b. Selanjutnya perluasan wilayah pada masa Bani Umayyah

Dalam perluasan wilayah, Muawiyah, dan dinasti Bani Umayyah umumnya melakukan berbagai penaklukan. Setidaknya, ekspansi dinasti ini meliputi tiga front, yaitu front pertempuran menghadapi bangsa Romawi di Asia kecil, Konstantinopel dan pulau-pulau di laut Tengah; front Afrika Utara dari selat Gibraltar hingga Spanyol; dan

---

<sup>2</sup>.Murodi, *Sejarah Kebudayaan Islam*,( Jakarta:Karya Toha Putra, 2000). h. 50



front timur hingga Sindus, India. Hingga akhir Bani Umayyah pada 700 M, kekuasaan Islam sudah mencapai lautan atlantik di barat dan lembah Indus di timur. Selain perluasan, Bani Umayyah juga melakukan berbagai penyempurnaan di bidang administrasi negara (birokrasi), perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Dalam bidang administrasi negara, untuk pertama kalinya Muawiyah memperkenalkan lembaga pengawal pribadi (hajib) dalam sistem pemerintahan. Para pengawal inilah yang menjalankan tugas-tugas protokoler khalifah dalam menentukan dan menerima siapa yang berhak bertemu dengan khalifah. Selain pengalaman tragedi Ali yang tewas terbunuh, Muawiyah juga mendapat inspirasi perlembagaan Hajib ini dari pengaruh Syam dan Persia.<sup>3</sup>

c. Perluasan atau ekspansi kekuasaan Islam pada masa Bani Abbas

Pada masa dinasti Abbasiyah, luas wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah, meliputi wilayah yang telah dikuasai Bani Umayyah, antara lain Hijaz, Yaman utara dan selatan, Oman, Kuwait, Irak, Iran (Persia), Yordania, Palestina, Lebanon, Mesir, Tunisia, Al Jazair, Maroko, Spanyol, Afganistan dan Pakistan, dan meluas sampai ke Turki, Cina dan juga India.<sup>4</sup>

d. Perluasan wilayah pada masa Turki Usmani

Bangsa Turki Usmani adalah tipe pejuang dan prajurit yang tangguh sepanjang perjalanan dinasti ini, penaklukan demi penaklukan

---

<sup>3</sup>*Ibid.*h. 50

<sup>4</sup>*Ibid.* h. 51.

terus dilakukan. Selama 6 abad lebih kekuasaannya, Usmani berhasil mengembangkan kekuasaannya ketiga benua, yaitu Asia, eropa, dan Afrika. Di Asia, luas wilayah Usmani meliputi Asia kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman. Di eropa, Usmani berhasil menguasai Bulgaria, Yunani, Albania, Yugoslavia, Hungaria, dan Rumania. Sementara di Afrika, Usmani mengembangkan sayapnya hingga Libia, Mesir, Tunisia, dan Aljazair.

## 2. Pemerintahan Daerah dalam Islam

Pemerintah dalam Islam dikenal sebagai Khilafah, Imamah dan ulil amr, Dalam wacana fikih siyasah, kata imamah biasanya diidentikan dengan khalifah. Keduanya menunjuka pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam, istilah imamah banyak digunakan oleh kalangan Syiah, sedangkan istilah khlilafah lebih populer penggunaanya dalam masyarakat Sunni.<sup>5</sup> Hal ini berdasarkan beberapa ayat Al-Quran seperti Q.S: An-Nisa ayat ke 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu*

---

<sup>5</sup> Ibid Hal 149

*benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*<sup>6</sup>.

Kemudian Q.S. Hud ayat ke 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا  
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya: *dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).*

Juga dalam Q.S Al-baqarah ayat ke 30,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ  
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي  
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

<sup>6</sup> Mushaf Al-Azhar, *Al- Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: Qur'an Suara Agung) , 2016 Hal:87



Demikian juga dalam Q.S. Shad ayat ke 26

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ  
عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Kemudian juga dalam Q.S Al-Imran ayat ke 26.

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِى الْمَلِكَ مَن تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَآءُ  
وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Ibid hal 53

Sedangkan para pakar tata Negara Islam yang mendukung adanya ‘Konsep Negara Islam’ menyebutkan ayat-ayat ini sebagai konsep dasar politik Islam (*Al-Siyasah Al-syari'at*).<sup>8</sup>

Sejatinya Islam terkhusus dalam Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan ataupun menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum muslimin.<sup>9</sup> Meskipun demikian, di dalam Al-Qur'an, hadis, maupun dalam sejarah Islam, dikenal beberapa konsep pemerintahan Islam yang dianut oleh umat muslim.

Konsep Pemerintah dalam Islam tertera pada kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, disebutkan bahwa Allah swt adalah pemilik segala sesuatu di dunia, Ia adalah *Rab* yang maha kuasa dan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi selainnya. Sebagai mana yang di wahyukan pada surat Al-Maidah ayat 18 :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُمْ اللَّهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

Artinya : Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya". Katakanlah: "Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?" (kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia(biasa) diantara orang-orang yang

<sup>8</sup> Abd.Gani Jumat, *Konsep Pemerintahan dalam Alquran: Analisis Makna Khalifah Dalam Prespektif Fiqih Politik*. E-Journal IAIN Palu. Vol. 11, No. 1, Juni 2014, h. 174.

<sup>9</sup> Abd.Gani Jumat, *Ibid*.h. 172.

*diciptakan-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi serta apa yang terdapat di keduanya. dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).*<sup>10</sup>

Pada ayat di atas, tertera kalimat “Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi serta apa yang terdapat di keduanya”. Sejatinya dalam pemerintahan Islam, penguasa tertinggi berada pada Rab atau Allah Subhanahu wata’ala. Namun Allah swt, selaku Maha Penguasa, tidak serta merta memerintah langsung secara eksplisit dalam segala bidang kehidupan makhluknya, melainkan dengan pemberian sebagian kekuasaan dalam hal kehidupan kepada salah satu makhluknya yaitu manusia. Salah satu bentuk perintah ataupun mandat yang diberikan Allah kepada Manusia sebagai makhluknya adalah bentuk pelimpahan sebagian kekuasaan di dunia, beserta norma, dan petunjuk pelaksanaan dalam menjalankan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang di berikan kepada mereka. Mengenai hal ini, Allah swt telah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَدْسِفُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

---

<sup>10</sup> Op.Cit hal 111

*Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".<sup>11</sup>*

Kata *Khalifah* sendiri memiliki banyak pengulangan kata dalam Al-Quran, pengertian kata Khalifah terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran dengan sifat kata tunggal, maupun plural atau jamak. Keseluruhan kata tersebut berakar dari kata *khulafaa'* yang memiliki arti “di belakang”, dari makna ini kata khalifah seringkali diartikan sebagai “pengganti” karena pengganti akan selalu berada di belakang yang akan digantikannya. Sesuai dengan kodrat khalifah sebagai pemerintah bermandat firman Allah pengganti sebagian kekuasaan-Nya di muka bumi.

Sedangkan menurut sejarah untuk pengenalan konsep sistem pemerintahan dalam Islam dimulai pada saat disahkannya piagam madinah. Menurut sejarahnya Nabi Muhammad saw, beserta seluruh umat Islam selama 13 tahun di Makkah sejak Nabi Muhammad saw diangkat menjadi Rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang sah dalam rangka menguasai suatu wilayah. Barulah pasca berhijrah menuju madinah, Rasulullah membuat sebuah piagam kesepakatan politik untuk mengatur kehidupan bersama di madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa saat itu, kedudukan

---

<sup>11</sup> Ibid hal 6



rasulullah tidak lagi hanya sebatas seorang Rasul, namun juga merangkap sebagai kepala negara. Pada piagam tersebut tertera beberapa pokok prinsip-prinsip dan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Mulai dari prinsip sosial, jaminan hak, dan kewajiban masyarakat terhadap pemerintah atau saat itu dikenal Khalifah. Inisiatif dalam piagam madinah yang dibentuk oleh Nabi Muhammad saw inilah yang menjadi bukti bahwa kala itu pengamalan atau praktik hukum ketatanegaraan atau siyasah telah dilakukan dalam suatu negara Islam.

Diperkuat dengan hasil peneleitian J. Suyuthi Pulungan, yang mengatakan terdapat empat belas prinsip yang berhubungan dengan pemerintahan dalam piagam madinah tersebut, yaitu : prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip umat, prinsip hubungan antar umat beragama, prinsip tolong menolong, dan membela yang teraniaya, prinsip hidup bertetangga, prinsip perdamaian, prinsip pertanian, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip kepemimpinan, dan prinsip ketaqwaan.<sup>12</sup> Prinsip-prinsip ini merupakan suatu sistem politik sekaligus menjadi bentuk pemerintahan yang harus dipedomani oleh umat muslim bahkan seluruh masyarakat di madinah pada masa itu.

### **3. Tugas dan Wewenang Pemerintahan Daerah Dalam Islam**

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil walaupun di jaman nabi belum ada Desa namun sama hal nya pada saat ini

---

<sup>12</sup> Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah dari Pandangan Quran*.h. 121.

yaitu sebutan daerah atau Desa berada di Indonesia yang mana sistem pemerintahannya tugas dan wewenangnya sama yakni sebagai penanggung jawab pemerintahan, Desa sendiri yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan yang penyelenggaraan pemerintahan Desa di lakukan oleh pemerintah Desa yang memiliki tugas dan wewenang yang paling dasar dalam arti dasar karena langsung berhubungan dengan masyarakat, kendatipun demikian tugas dan wewenang pemerintah Desa tidak bisa dianggap sebelah mata. Pemerintah Desa selaku perwakilan pemerintah pusat yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah penggerak roda-roda pemerintahan yang berada di atasnya. Tanpa adanya pemerintah Desa maka tugas pemerintah di atasnya akan tidak efektif.

Dalam menjalankan otonominya tersebut, pemerintah Desa mempunyai beban amanah kekuasaan yang cukup tinggi. Sebagai pelaksana amanat tersebut pemerintah Desa mempunyai tugas dan wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana tertera dalam Al-Quran dalam surat an-nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Menurut al-Mawardi pemerintah memiliki tugas umum sebagai berikut:

1. Mempertahankan agama dan memelihara agama juga prinsip-prinsipnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan kepastian hukum antara pihak-pihak berselisih, dalam hal ini pemerintah Desa memiliki tugas penengah dari sebuah sengketa atau perselisihan di dalam pemerintahannya.
3. Menjaga wilayah umat Islam dan menjaga kehormatan umat agar mereka bebas dan aman baik secara lahir maupun batin.
4. Memelihara hak-hak rakyat atau umat dan hukum-hukum Allah.
5. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
6. Jihad terhadap orang-orang kafir yang menentang Islam, setelah adanya dakwah kepada mereka.
7. Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan *syara'*, *nash* dan *ijtihad*.
8. Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif.
9. Meminta pandangan dan nasihat dari orang-orang terpercaya
10. Rajin turun langsung ke lapangan agar mengetahui, memahami dan mampu mengurai semua persoalan yang dialami oleh rakyatnya..<sup>13</sup>

Dalam mengatur umat dan memelihara agama, pemerintah dan kepala negara harus menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.

## **B. Konsepsi Dasar Pemekaran Desa dalam Hukum Positif**

### **1. Pengertian Desa**

Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian mandiri dan otonom.<sup>14</sup>

Desa juga dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan NKRI.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut UUNo. 6 tahun 2014 tentang Desa mengemukakan

<sup>13</sup> Imam al Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta:Qisthi Press, 2015 Hal:33

<sup>14</sup> Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung; Aura Publishing, 2017, h. 17

<sup>15</sup> Zuhraini, *Op.cit*, h. 17

bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>16</sup>

Eko dalam Huda Mengemukakan “desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.<sup>17</sup> Maschab dalam Huda Berpendapat bahwa apabila membicarakan masalah “desa” di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian, yaitu:

- a. Pengertian secara *sosiologis*, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, kehidupan mereka *relative homogeny*, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.
- b. Pengertian secara *ekonomis*, desa merupakan suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya.
- c. Pengertian secara *politik*, dimana “desa” suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

<sup>17</sup> Maschab dalam Huda. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015. h. 33



mempunyai wawenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara.<sup>18</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Geertz dalam Huda bahwa “desa berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti daerah pinggiran, tempat, daerah yang bergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang diperintah oleh suatu kekuasaan diluar desa.”<sup>19</sup>

## 2. Pengertian Pemekaran Daerah/ Desa

Jeddawi mengemukakan bahwa “pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah”.<sup>20</sup> Lebih lanjut, Yunaldi dalam Sapi’ik mengemukakan bahwa pemekaran desa adalah pemecahan satu wilayah desa menjadi dua atau lebih dengan pertimbangan karena keluasan wilayahnya, kondisi geografisnya, pertumbuhan jumlah penduduk, efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik serta kondisi sosial politik yang ada.<sup>21</sup>

Berdasarkan dua pernyataan tersebut, jelas bahwa pemekaran merupakan pemecahan daerah menjadi lebih dari satu daerah yang melalui beberapa pertimbangan seperti jumlah penduduk, luas daerah dan kondisi geografis.

---

<sup>18</sup> Ibid, h. 31

<sup>19</sup> Ibid. h. 33

<sup>20</sup> Murtir Jeddawi. *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*. Yogyakarta: Total Media, 2009. h. 22

<sup>21</sup> Sapi’i. *Dampak Pemekaran Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*. Volume 1 Nomor 1: 2-3, 2013, h.2

### 3. Syarat-Syarat Pemekaran Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya pasal 8, mengemukakan bahwa pemekaran atau pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat yaitu:

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu:
  - 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
  - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
  - 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
  - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
  - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
  - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
  - 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
  - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
  - 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Menurut beberapa syarat pemekaran yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah sangat jelas, bahwasanya pemekaran daerah tidak bisa begitu saja dilakukan dengan semena-mena melainkan harus melalui persetujuan dari DPRD Kabupaten/kota, gubernur/walikota serta rekomendasi menteri dalam negeri. Di samping itu daerah/ desa yang akan dimekarkan juga harus memiliki luas daerah, jumlah penduduk, kemampuan ekonomi, dan potensi alam yang baik, agar kiranya setelah dimekarkan dari daerah induk, daerah hasil pemekaran mampu terus berkembang menjadi lebih baik.

#### 4. Faktor-Faktor Pemekaran Desa

Ada Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemekaran daerah, baik berupa faktor pendorong maupun faktor penghambatnya. Makagansa mengemukakan bahwan ada beberapa motif dari proses pemekaran didaerah yang tidak disebut secara terbuka oleh para penggiat pemekaran, tetapi sesungguhnya menjadi faktor esensial yang kuat mendorong terjadinya pemekaran daerah, yaitu:

- a. Motif demi mencapai keadilan jumlah pemerintahan daerah di pulau Jawa vs luar Jawa
- b. Motif politik identitas kultur
- c. Motif demi menciptakan peluang perekrutan jabatan bagi elit lokal
- d. Motif menciptakan peluang kucuran dana pusat

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Desa Kelurahan Dan Kecamatan Penerbit Pustaka Mahardika hal 10-

- e. Motif merebut hasil kekayaan sumber daya alam
- f. Motif dalam rangka mewujudkan pemekaran provinsi
- g. Motif fasilitas aturan perundangan<sup>23</sup>

Tim Bank Dunia dalam Ratnawati menyatakan bahwa ada empat faktor utama yang mendorong terjadinya pemekaran wilayah yaitu:

- a. Motif untuk efektivitas/efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan ketertinggalan pembangunan.
- b. Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, *urban-rural*, tingkat pendapatan, dll)
- c. Adanya kemajuan fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang (disediakkannya dana alokasi umum, bagi hasil dari sumber daya alam, dan disediakan sumber-sumber pendapatan asli daerah).
- d. Motif pemburu rente para elit.<sup>24</sup>

Jeddawi mengemukakan bahwa faktor terjadinya pemekaran adalah:

- a. Faktor pendorong seperti: faktor kesejahteraan, tidak meratanya pembangunan, rentan kendali pelayanan publik yang jauh dan tidak terakomodasinya representasi politik
- b. Faktor penarik seperti: kucuran dana (fiskal) dari pusat
- c. Faktor yang memfasilitasi munculnya pemekaran, diantaranya adalah: proses persiapan untuk mekar, *political crafting* oleh para elit dan faktor tuntutan keamanan daerah perbatasan.<sup>25</sup>

Selain itu, Bhakti dalam Ratnawati, juga menyebutkan “ada satu motif tersembunyi dari pemekaran (*gerrymander*) yaitu usaha pembelahan atau pemekaran untuk kepentingan parpol tertentu”.<sup>26</sup> Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor pendorong dalam sebuah pemekaran daerah tidak sepenuhnya murni demi perbaikan kualitas hidup masyarakat, akan tetapi faktor-faktor lain seperti adanya kepentingan pribadi atau golongan-golongan elit yang ingin

<sup>23</sup> Makagansa. *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: FusPad, 2008. h. 165

<sup>24</sup> Tim Bank Dunia dalam Tri, Ratnawati. *Pemekafran Daerah Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. h.15

<sup>25</sup> Jeddawi. op. cit. h. 116

<sup>26</sup> Bhakti dalam Ratnawati. loc. cit



mendapatkan jabatan juga ikut serta dalam mendorong pemekaran suatu daerah.

## 5. Tujuan Pemekaran Desa

Menurut Jeddawi, konsepsi pemekaran dapat dilihat dari konteks tujuannya dan dari indikator kelayakan suatu daerah untuk dimekarkan. Berikut adalah beberapa tujuan pemekaran yang dilihat dari beberapa aspek:

- a. Dari aspek ekonomi: pemekaran diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengambilan keputusan, sehingga pemerintah dapat merespon secara cepat kebutuhan masyarakat.
- b. Dari aspek politik: pemekaran daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, karena rentang kendali menjadi lebih pendek.
- c. Dari aspek sosial budaya: pemekaran diharapkan dapat mengakomodasi identitas lokal dan akan berpengaruh pada pilihan-pilihan lokal dalam menentukan arah pembangunan daerah pemekaran.
- d. Dari aspek politik keamanan: pemekaran daerah akan mendorong berkembangnya lembaga-lembaga militer dan kepolisian diluar Jawa terutama di daerah-daerah rawan konflik sosial dan konflik separatisme.<sup>27</sup>

## 6. Prosedur Pemekaran Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penggabungan Daerah pasal 14 menyebutkan ada beberapa prosedur dalam pemekaran daerah, yaitu:

- a. Adanya aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD (Badan Perwakilan Desa) untuk desa, atau Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
- b. Keputusan DPRD Kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat

---

<sup>27</sup> Retnaningsih, dkk dalam Jeddawi.op. cit. h. 115

- c. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi tersebut dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah.
- d. Keputusan bupati/walikota disampaikan kepada gubernur dengan melampirkan:
  - 1) Dokumen aspirasi masyarakat
  - 2) Keputusan DPRD kabupaten/ kota dan keputusan bupati/walikota.
- e. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi atau kabupaten/kota yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD Provinsi\
- f. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD Provinsi, gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada presiden melalui menteri dengan melampirkan:
  - 1) Hasil kajian daerah
  - 2) Peta wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota
  - 3) Keputusan DPRD kabupaten/ Kota dan Keputusan bupati/walikota
  - 4) Keputusan DPRD Provinsi dan Keputusan Gubernur.<sup>28</sup>

## 7. Bentuk-Bentuk Pemekaran Desa

Santoso mengemukakan bahwa bentuk-bentuk permasalahan yang dihadapi daerah pemekaran adalah sebagai berikut:

- a. Aset daerah induk belum diserahkan ke daerah pemekaran;
- b. Tidak ada manajemen transisi dan konsesus pengelolaan daerah pasca pemekaran yang disepakati antara daerah induk dan daerah pemekaran;
- c. Daerah pemekaran tidak menyiapkan perangkat-perangkat administratif dan legal baru;
- d. Daerah pemekaran tidak punya potensi sumber daya daerah yang bisa dikonversi menjadi sumber-sumber ekonomi baru.<sup>29</sup>

## 8. Dampak Pemekaran Desa

Jeddawi mengemukakan dampak positif dan negatif dari adanya pemekaran, diantaranya sebagai berikut:

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penggabungan Daerah pasal 14

<sup>29</sup> Lay Santoso. *Perjuangan Menuju Puncak*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, 2006. h. 14

a. Dampak Positif

- 1) Akses percepatan pelayanan masyarakat akan dapat semakin cepat, karena lebih dekat dengan masyarakat.
- 2) Alokasi dana dari daerah induk dan pemerintah pusat senantiasa ada (walaupun dari pandangan daerah induk dan pemerintah pusat dianggap sebagai beban), kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah otonom baru (belanja publik lebih besar dari pada belanja aparatur), tentu akan memberikan implikasi positif bagi masyarakat daerah bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Penanganan Infrastruktur pelayanan publik, jalan, jembatan, puskesmas, prasarana pendidikan, dan saluran irigasi akan semakin insentif ditata dan dikelola dengan baik.

b. Dampak Negatif

- 1) Proses pemekaran terkadang menimbulkan pertentangan di masyarakat.
- 2) Meningkatkan ongkos penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga semakin mengurangi porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat digunakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat.<sup>30</sup>

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Jeddawi, bahwa kebijakan pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah, akan membawa dampak yang positif dan negatif terhadap masyarakat serta pemerintah.

Dengan adanya pemekaran, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan semakin dekat, pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Namun disisi lain, dengan adanya pemekaran akan menjadi beban tersendiri bagi APBN, karena daerah pemekaran baru akan banyak memerlukan dana untuk membangun asset-asset pemerintahan yang baru.

Pratikno dalam Makagansa mengemukakan dampak pemekaran daerah dari sisi positif dan negatif yang terjadi sejauh ini, yaitu:

---

<sup>30</sup> Jeddawi.op. cit. h. 113

- a. Dampak Sosio Kultural (Sosial, Politik dan Kultural)
- b. Dampak pada Pelayanan Publik
- c. Dampak Bagi Pembangunan Ekonomi
- d. Dampak Hankam dan Integrasi Nasional<sup>31</sup>

Sapi'i menyatakan dengan adanya pemekaran desa akan berdampak pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur desa yang dimekarkan akan mempunyai dampak positif terhadap wilayah tersebut:

- a. Rentang kendali pelayanan pemerintah menjadi mudah terjangkau
- b. Peningkatan pembangunan ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat kesejahteraan gizi buruk
- c. Peningkatan kesejahteraan
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- e. Pengembangan wilayah distrik.<sup>32</sup>

Sedikit berbeda dengan pendapat Jeddawi, Sapi'i menyatakan bahwa "pemekaran suatu daerah akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya, pengembangan wilayah distrik, dan pemahaman pendidikan politik terhadap masyarakat pemekaran".<sup>33</sup> Sapi'i, mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pemekaran Desa di Indonesia akan menemui dampak positif maupun negatif, yaitu:

- a. Dampak Positif
  - 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah tersebut
  - 2) Meningkatkan potensi yang ada dalam tiap daerah
  - 3) Menunjang sarana untuk kemandirian tiap usaha-usaha mikro

<sup>31</sup> Pratikno dalam Makagansa.op. cit. h. 196-201

<sup>32</sup> Setiawan dalam Sapi'i dkk, loc. cit

<sup>33</sup> Sapi'i. loc. cit

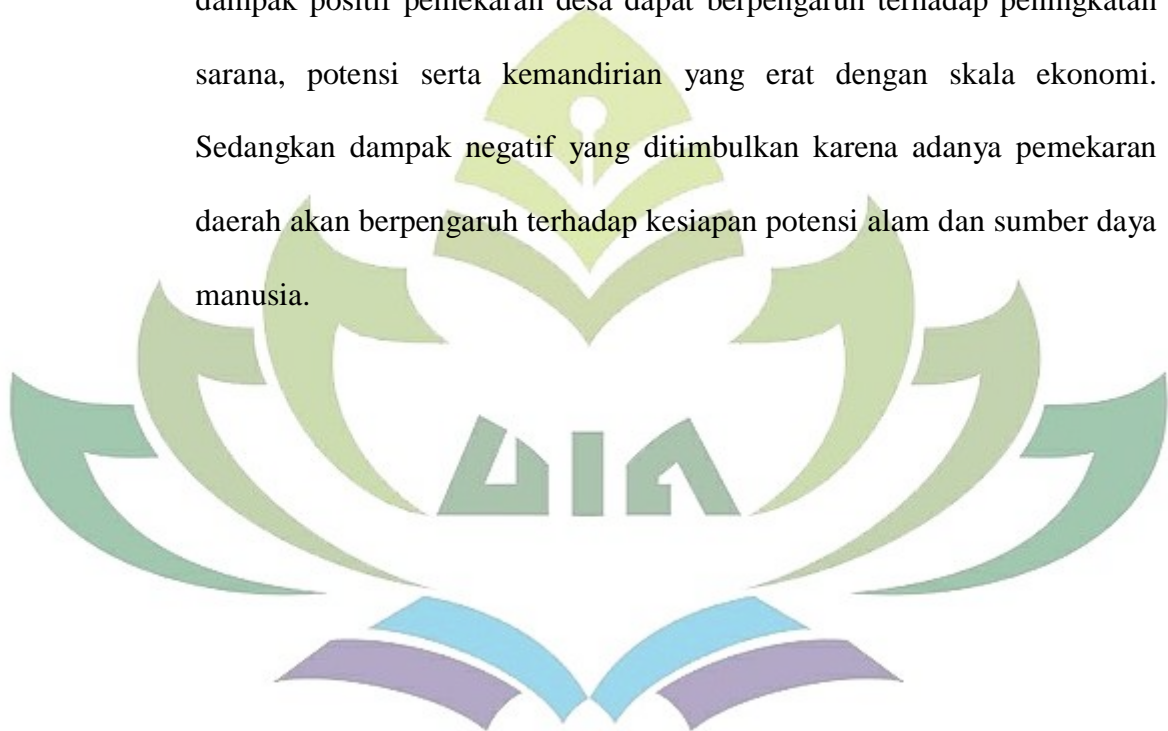


atau makro masyarakat, seperti bertani dan berladang

b. Dampak Negatif

- 1) Karena kondisi daerah yang berbeda maka potensi yang dikembangkan kurang memiliki prospek yang baik kedepannya
- 2) Kurangnya tenaga-tenaga ahli untuk memberikan kontribusi pada desa yang belum mapan
- 3) Menimbulkan diskriminasi terhadap desa yang dinilai secara sosial masyarakat.<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dampak positif pemekaran desa dapat berpengaruh terhadap peningkatan sarana, potensi serta kemandirian yang erat dengan skala ekonomi. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya pemekaran daerah akan berpengaruh terhadap kesiapan potensi alam dan sumber daya manusia.



---

<sup>34</sup> Ibid. h. 3

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Sidomekar**

Desa Sidomekar merupakan sebuah Desa pemekaran atau pengembangan dari Desa Sido Mukti dan Desa Makarti Tama, maka sejarah terbentuknya Desa tersebut akan berkaitan dengan Desa induk atau Desa sebelum terjadinya pemecaha atau pengembangan. Secara historis pemekaran Desa Sidomekar terjadi pada suatu malam panitia hari besar Islam (PHBI) di Rukun Warga/Dusun Sido Rahayu Desa Sido Mukti berlokasi di Mushola Bapak Miryono, Jalan beringin diadakan panitia hari besar Islam (PHBI) yaitu Isro'Mi'roj Nabi Muhammad saw di dalam sambutan tokoh masyarakat yang diwakili oleh Bapak Sutiyo pada waktu itu beliau juga merangkap sebagai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sido Mukti didalam sambutannya menyinggung bahwa Rukun warga Sido Rahayu dan Air Toba sudah layak dijadikan Desa atau kampung tersendiri (Tahun 2007). Sesuai PP Nomor 72 Tahun 2005 setelah selang beberapa bulan tokoh dari ke-2 kampung induk saling tukar pendapat,informasi,study kelayaakan pemekaran untuk mendirikan kampung baru.<sup>1</sup>

Maka pada hari Sabtu Tanggal 10 November 2008 bertempat di SDN

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku kepala Desa SidoMekar Tanggal, 26 Mei 2018, jam 10.00 WIB di Kantor Desa Sidomekar

02 SidoMukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang mengadakan rapat / musyawarah pemekaran kampung yang dihadiri oleh Kepala Kampung, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota, Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) beserta anggota, Kepala Suku, Tokoh Agama, tokoh masyarakat, dan Tokoh Pemuda Desa Sidomukti dan Desa Makartitama. Dalam musyawarah/ rapat tersebut dapat menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Panitia Pemekaran Desa
- b. Menggabungkan bagian Desa SidoMukti dan Desa Makartitama untuk menjadi Desa Baru
- c. Meyepakati calon kepala Desa pemekaran dan perangkat Desa serta kelembagaan Desa.
- d. Menyepakati Desa pemekaran diberi nama “Sidomekar”

Dari bergulirnya waktu ke waktu Desa Sidomekar telah memiliki dan menyepakati saudara Krisbandi Sutrisno diangkat sebagai Kepala Desa Sidomekar (pjs) dan pada tanggal 27 Juli 2009 diputuskan oleh Bupati Tulang Bawang. Selang beberapa hari Desa Sidomekar bertepatan tanggal 10 Agustus 2009 diresmikan menjadi Desa tersendiri yaitu oleh Bapak Bupati Tulang Bawang Bapak Abdul Rahman Sarbini.<sup>2</sup>

## **2. Keadaan Geografis dan Desa Sidomekar**

Secara umum dan kewilayahan, Desa Sidomekar merupakan salah satu Desa hasil pemekaran yang terletak di Kecamatan Gedung Aji Baru

---

<sup>2</sup> Arsip Dokumen Desa SidoMekar , Observasi Tanggal, 26 Mei 2018, jam 10.00 WIB di Kantor Desa SidoMekar

Kabupaten Tulang Bawang, dan jika ditinjau secara geografis Desa Sidomekar sangat berpotensi berkembang karena penduduk Desa mempunyai kebun dan ladang serta berdekatan dengan PT. Sumber Indah Perkasa Sinar Mas Sungai Merah Mil (PT. SIP SMRM), sehingga secara kewilayahan laju pertumbuhan ekonomi akan stabil ditambah dengan Sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas juga akses transportasi sudah dapat menjangkau hampir seluruh bagian Desa. Maka dengan demikian potensi untuk maju dan berkembang sangatlah tinggi. Adapun batas-batas wilayah Desa Sidomekar kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Sumber Indah Perkasa Sinar Mas Sungai Merah Mil (SMRM).
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pidada
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa SidoMukti
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa MakartiTama.

### **3. Keadaan Demografis Desa Sidomekar**

- a. Jumlah Penduduk

Desa Sidomekar dihuni oleh berbagai suku seperti Jawa, Lampung, Bali, Palembang, dan suku lainnya. Penduduk Desa Sidomekar berjumlah 1857 jiwa, penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 968 jiwa, dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 889 jiwa. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk Desa Sidomekar dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel. 1  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	968 jiwa
2	Perempuan	889 jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>1.857 jiwa</b>

Sumber data: Kantor Desa Sidomekar<sup>3</sup>

b. Luas wilayah

Kemudian jika dilihat dari luas wilayah Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang. Luas keseluruhan Desa Sidomekar adalah 1513,5 Ha dengan ketinggian 14 meter dari permukaan laut yang meliputi tanah sawah/pertanian, pemukiman, lahan miring, dan lahan lainnya yang tidak termasuk dalam keterangan lahan atau tanah diatas. dapat di lihat lebih jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2  
Luas Wilayah Desa Sidomekar

No	Keterangan lahan	Luas
1	luas tanah sawah/pertanian	559 Hektare
2	luas tanah pemukiman	120 Hektare
3	luas tanah kemiringan lahan	545 Hektare
4	luas tanah lainnya	289,5 Hektare
<b>Jumlah</b>		<b>1513,5 Hektare</b>

Sumber data: Kantor Desa Sidomekar<sup>4</sup>

c. Keadaan Sosial

Keadaan sosial masyarakat Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang bila melihat riwayat pendidikan

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Dendi selaku Sekertaris Desa SidoMekar Tanggal, 26 Mei 2018, jam 10.30 WIB di Kantor Desa SidoMekar

<sup>4</sup> *Ibid.*

yang telah ada tentunya masyarakat Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang mayoritas hanya berpendidikan sekolah dasar (SD/MI). Sebagaimana lebih jelas pada tabel berikut ini:

Tabel. 3  
Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	103 Orang
2.	SD/MI	1100 Orang
3.	SLTP/MTS	167 Orang
4.	SLTA/MA	36 Orang
5.	S2/S1/Diploma	17 orang
6.	Putus Sekolah	287 Orang
7.	Balita	147 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>1857 orang</b>

Sumber data: Kantor Desa Sidomekar<sup>5</sup>

Berdasarkan tabel 3 di atas tentunya berkaitan dengan sarana penunjang dalam rangka untuk mencapai tingkat pendidikan yang tergolong baik atau dengan kata lain, masyarakat Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang berpendidikan menengah atas hingga sarjana, hal tersebut merupakan bagian dari dampak belum terpenuhinya sarana pendidikan yang terdapat di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang, yang mana saat ini di desa tersebut belum terdapat 1 unit pun sekolah tingkat pertama hingga menengah, sebagaimana tabel berikut ini:

---

<sup>5</sup> Ibid.

Tabel. 4  
Lembaga Pendidikan

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	2 unit
2	SD/MI	2 unit
3	SLTP/MTS	-
4	SLTA/MA	-
<b>Jumlah</b>		<b>4 unit</b>

Sumber data: Kantor Desa Sidomekar<sup>6</sup>

Kemudian bila berbicara berkenaan dengan keyakinan yang di anut oleh masyarakat Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang berdasarkan data yang penulis peroleh mayoritas masyarakat Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang memeluk agama Islam sesuai dengan data pada tabel berikut ini:

Tabel. 5  
Jumlah Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1810 jiwa
2	Katolik	-
3	Kristen	24 jiwa
4	Hindu	18 jiwa
5	Buda	5 jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>1.857 jiwa</b>

Sumber data: Kantor Desa Sidomekar<sup>7</sup>

Keadaan sosial masyarakat Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang berkenaan dengan sarana dan prasarana ibadah tentunya sesuai dengan apayang mereka yakini yakini yaitu agam Islam, tentunya rumah ibadah yang mayoritas di Desa

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang adalah masjid sesuai dengan data yang telah penulis peroleh di lapangan pada tabel berikut ini:

Tabel. 6  
Tempat Ibadah

No	Tempat ibadah	Jumlah
1	Masjid	2 unit
2	Mushola	10 unit
3	Gereja	-
4	Pura	1 unit
5	Vihara	-
Jumlah		13 unit

Sumber data: Kantor Desa Sidomekar<sup>8</sup>

Aapun keadaan sosial dalam bidang mata pencarian masyarakat Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang sebagian besar adalah petani kebun. Hal itu sebagai mana data yang ada di bawah ini:

Tabel. 7  
Mata Pencanharian Penduduk

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	8 Orang
2	TNI	-
3	POLRI	1 orang
4	Bidan/Perawat	-
5	Karyawan Swasta	121 Orang
6	Petani	798 Orang
7	Buruh	323 Orang
8	Tidak bekerja	606 Orang
Jumlah		1857 orang

Sumber data: Kantor Desa Sidomekar<sup>9</sup>

Keadaan sosial masyarakat Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang dalam bidang pembagian wilayah

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Ibid.



Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang

Bawang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 8  
Pembagian Wilayah Desa

No	Nama Rukun keluarga	Jumlah RT
1	RW I	4
2	RW II	4
3	RW II	3
4	RWIV	3
5	RW V	3
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

Sumber data: Kantor Desa Sidomekar<sup>10</sup>

Sedangkan dalam hal lembaga kemasyarakatan di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang berdasarkan data yang penulis peroleh sudah baik dengan terpenuhinya semua unsur lembaga kemasyarakatan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 9  
Lembaga Kemasyaratan

No	Nama Lembaga	Jumlah Anggota
1	Karang Taruna	16 orang
2	PKK	6 orang
3	BPD	11 orang
4	Linmas	2 orang
5	LPM	5 orang
6	Kelompok Tani	20 orang
<b>Jumlah</b>		<b>60 orang</b>

Sumber data: Kantor Desa Sidomekar<sup>11</sup>

#### d. Masalah dan Potensi

Untuk mendukung dalam perencanaan dan proses pembangunan di Desa Sidomekar terdapat berbagai masalah dan potensi yang di

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

identifikasi dari proses kajian Desa sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel.10  
Masalah Dan Potensi Desa Sidomekar

No	Bidang	Masalah	Potensi
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Kurangnya sarana dan perasarana Desa	Adanya sumberdaya manusia
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Banyaknya jalan yang belum diaspal namun sudah di onderlag	Gotong royong serta kekompakan masyarakat dalam pembangunan
3	Pembinaan Kemasyarakatan		Adanya lahan dan sumber daya alam
4	Pemberdayaan Masyarakat		Kelompok tani ada, karangtaruna ada dan kelembagaan lainya ada

## B. Kondisi Desa Sidomekar Sebelum Pemekaran

Kondisi Desa Sidomekar pada saat itu merupakan rukun warga yang terletak di antara dua perbatasan atau ujung Desa, yakni antara ujung Desa Sidomukti dan Desa Makarti Tama. Hal ini tentu saja berdampak pada masyarakat di rukun warga tersebut ketika akan melakukan kegiatan administrasi atau kegiatan lainnya di kantor Desa, yang membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit dan lama.<sup>12</sup>

### 1. Sistem atau Prosedur

ketika masih menginduk dengan Desa Sidomukti dan Desa Makartitama masyarakat yang ingin melakukan pengurusan suatu berkas, akan merasa kurang puas dengan sitem dan prosedur yang sedikit

<sup>12</sup> *Ibid*, Bapak Sutrisno

Sistem dan perosedur di desa induk sudah sesuai dengan undang undang yang mana dalam pengurusan surat-surat harus di laksanakan di kantor desa tanpa terkecuali dan tidak ada dispensasi kepada warganya terkadang dengan luasnya wilayah serta banyaknya jumlah penduduk yang mengurus akta kelahiran dan surat surat lainnya tak jarang dalam pengurusan selesai sehari terkadang memakan waktu yang berhari hari di karnakan banyakny jumlah penduduk serta jauh nya penduduk dari kantor desa.sehingga memberatkan masyarakat selaku masyarakat desa,di tambah lagi kurang nya sosialisai terhadap waraga tentang pengurusan akta kelahiran dan surat surat lainnya sehinga terkadang masyarakat bingung dan bisa memakan waktu berhari hari karna berkas ny kurang lengkap, hal ini terjadi tak lepas dari sistem yang diterapkan oleh pemerintah desa yang cukup sulit, mengapa hal ini terjadi ?karena saat di Desa induk tidak ada dispensasi waktu dalam pengurusan,serta sosialisai terhadap masyarakat dimana dalam segala bidang yang berkenaan dengan pengurusan berkas dan pelayanan di kantor desa tidak dapat dilakukan di luar jam kerja kantor Desa serta tidak ada tambahan waktu dalam pelayanan masyarakat

<sup>13</sup>

## **2. Pelayanan Masyarakat**

Jangka waktu pelayanan ialah tenggang waktu yang di butuhkan oleh aparat Desa untuk menyelesaikan proses pelayanan masyarakat

---

<sup>13</sup> Ibid

seperti pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Dalam hal pelayanan publik, aparat pemerintah Desa hendaknya memberikan kepastian jangka waktu proses pelayanan kepada masyarakat. Beda halnya pada Desa Sidomekar yang belum mampu memberikan kepastian terhadap jangka waktu pelayanan pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Hal itu disebabkan karena tidak adanya kepastian waktu yang diberikan oleh Dinas Kependudukan kepada aparat pemerintah Desa Sidomekar dalam proses penyelesaian akta kelahiran dan kartu keluarga. Seperti yang telah di ungkapkan oleh bapak Dendi selaku sekretaris Desa Sidomekar dalam petikan wawancara berikut:

Sebenarnya untuk kepengurusan Akta dan Kartu Keluarga ada dua tempat yang berbeda, tetapi tidak ada penjelasan dan keterangan yang diberikan oleh aparat Desa sehingga masyarakat menjadi bingung dan merasa malas dalam pengurusan berkas-berkas itu.<sup>14</sup>

Pendapat dari Bapak Dendi juga diperkuat dari pengakuan Ibu Susiyam yang sempat mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, “waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, itu mesti menunggu waktu yang lama, hampir 3 bulan dari proses awal pengurusan dan tidak diberi penjelasan atau keterangan, jadi setelah mengurus berkas saya hanya menunggu tanpa ada keterangan berapa lama prosesnya.”

Hasil wawancara di Desa Sidomekar menjelaskan bahwa, aparat pemerintah Desa belum mampu memberikan kejelasan kepada masyarakat

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan dendi. Loc.cit



masalah jangka waktu proses pelayanan akta kelahiran dan kartu keluarga.

### 3. Biaya atau Tarif

Ketika belum mengalami pemekaran, dalam pengurusan berkas seperti akta dan kartu keluarga sejatinya tidak dipungut biaya ataupun tarif. Namun adapun biaya yang diberikan merupakan kesadaran dari masyarakat yang memberikan ongkos jasa yang biasanya di berikan yakni berjumlah 50.000 untuk pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, hal ini disebabkan jarak antara desa dengan tempat pengurusan yang sangat jauh Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dendi.<sup>15</sup>

Pernyataan bapak dendi ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Yustina dalam petikan wawancara berikut, *“waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga dulu, saya membayar ke petugas sekitar Rp.50.000”*.<sup>16</sup>

Sama dengan yang diungkapkan oleh Ibu Yustina, Ibu Susiyam juga mengungkapkan masalah biaya pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, *“Karena saya tidak tahu dan tidak bisa ngurus ke Kabupaten jadi saya minta tolong sama orang-orang di kantor Desa untuk kesana, waktu itu saya bayar Rp. 50.000 untuk pengganti bensin”*.<sup>17</sup>

Selain kedua pernyataan tersebut, terdapat pula pernyataan dari Ibu Rianti, *“waktu saya mengurus surat-surat (akta dan KK) saya*

<sup>15</sup> Wawancara dengan Dendi, loc. cit

<sup>16</sup> Wawancara dengan Yustina Selaku masyarakat Desa Sidomekar tanggal 26 Mei 2018, jam 14.25 WIB di Kantor Desa SidoMekar

<sup>17</sup> Wawancara dengan Susiyam Selaku masyarakat Desa Sidomekar Tanggal 26 Mei 2018, jam 15.00 WIB di Kantor Desa SidoMekar

*memberikan uang jalan 100.000 ke petugas kantor di desa, ya karena kantor Disduk Capil jauh di Kabupaten ”.*<sup>18</sup>

#### **4. Sarana dan Prasarana**

Dalam pelayanan publik, belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya pelayanan publik yang prima. Sebelum pemekaran, fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Sidomekar masih sangat terbatas karena saat itu Desa Sidomekar terletak di ujung Desa segala fasilitas yang berkenaan dengan kantor Desa masih berada pada kantor Desa induk. Kurangnya sarana dan prasarana di Desa Sidomekar diungkapkan oleh Bapak Dendi selaku Sekretaris Desa Sidomekar dalam petikan wawancara berikut:

*Sarana dan prasarana Desa sebelum pemekaran, jika dilihat dalam hal kesehatan Desa kami belum memiliki Pustu (pusat kesehatan terpadu). Untuk sarana dan prasarana dalam melayani keperluan masyarakat semua masih terpusat pada Desa induk. Dan tentu saja keterbatasan semua itu berdampak pada terganggunya proses pelayanan aparat pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat. Selain pusat kesahatan terpadu akses jalan juga saat belum terjadi pemekaran masih kurang baik ya mklum di kernakan letak saat itu desa sidomekar terletak di ujung Desa Sidomukti dan Makartitama.*<sup>19</sup>

#### **5. Kompetensi Pelaksana**

Berkenaan dengan kompetensi pelayanan desa sidomekar sebelum pemekaran berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Rianti Selaku masyarakat Desa Sidomekar Tanggal 26 Mei 2018, jam 15.30 WIB di Kantor Desa SidoMekar

<sup>19</sup> Wawancara dengan Dendi, loc. cit

menjelaskan bahwa :

*Meskipun menurut pengakuan Bapak Dendi selaku Sekertaris Desa Sidomekar, kecakapan aparat Kantor Desa Sidomukti sudah sangat baik dan mumpuni, namun tak bisa dipungkiri keramahan dan kesopanan aparat dalam melayani masyarakat masih kurang baik, hal itu kami menyadari bahwa besar kemungkinan karena adanya jarak daerah yang berpengaruh kepada sikap sosial para aparat Desa induk terhadap kami selaku desa yang berada di bawah naungan mereka. Karena secara sosial tentu saja masyarakat Desa Sidomekar sangat jarang untuk berintraksi langsung dengan masyarakat yang ada di Desa induk kala itu Desa Sidomukti dan Makartitama”.*<sup>20</sup>

### **C. Dampak Pemekaran Desa Sidomekar.**

#### **1. Sistem atau Prosedur**

Prosedur merupakan sistem kerja aparat pemerintah Desa Sidomekar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sebuah pelayanan, kesederhanaan prosedur merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena hal tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Kesederhanaan prosedur yang diberikan aparat pemerintah Desa Sidomekar kepada masyarakat dapat terlihat dari cara aparat memberi pelayanan kepada masyarakat yang tidak mengenal tempat. Masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga tidak harus datang ke kantor Desa, karena aparat pemerintah Desa Sidomekar juga menerima dengan baik masyarakat yang datang kerumah Kepala Desa dan Sekretaris Desa meskipun telah diluar jam kerja. Selain itu, aparat pemerintah Desa Sidomekar juga selalu siap untuk membantu

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Susiyam, loc. cit

masyarakat membawa kelengkapan syarat-syarat pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga ke kantor kependudukan, oleh karena itu masyarakat tak perlu lagi bersusah payah menuju ke kantor kependudukan.

*“Saya tidak keberatan jika harus melayani masyarakat di luar jam kerja saya. Saya juga menerima masyarakat yang datang kerumah saya untuk mendapatkan pelayanan, sekalipun pada malam hari. Tapi untuk hari sabtu dan minggu saya mohon maaf, saya tidak bisa melayani masyarakat karena pada hari itu saya berada di kebun”.*<sup>21</sup>

Pendapat yang tak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Bapak Ansar selaku Kaur Administratif Desa Sidomekar yang siap untuk membantu masyarakat mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga ke kantor kependudukan, dalam petikan wawancara berikut:

*“Jika masyarakat ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, datang saja ke kantor Desa dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Jika masyarakat tidak sempat untuk datang ke kantor kependudukan maka kami yang akan membantu masyarakat untuk ke kantor kependudukan”.*<sup>22</sup>

Dengan adanya kesederhanaan seperti itu, masyarakat akan merasa sangat dimudahkan dalam melakukan pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Jika pada siang hari masyarakat sibuk, maka pada malam harinya mereka masih dapat mendapatkan pelayanan dari aparat pemerintah Desa Sidomekar. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Ibu Rianti:

*Awalnya Saya datang ke rumah kepala Desa, kemudian saya diberi tahu tentang syarat-syarat yang harus saya bawa dan saya lengkapi. Habis itu bapak-bapak yang datang kerumah saya untuk mengambil syarat-syarat yang telah lengkap dan kemudian saya hanya tinggal menunggu akta kelahiran dan kartu keluarga saya jadi”.*<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid. Bapak Ansar

<sup>23</sup> Wawancara dengan Rianti selaku masyarakat Desa Sidomekar Tanggal 28 Mei 2018, jam 11.00 WIB di rumah ibu Rianti selaku warga Desa Sidomekar.



Hal yang tak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Ibu Sumiati dalam petikan wawancara berikut:

*Dua bulan yang lalu lah, waktu itu saya datang ke kantor Desa, saya bilang mau mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, kemudian saya diberi tahu syarat-syaratnya terus saya mengisi blanko yang dikasih ke saya, setelah itu aparat Desa Sidomekar yang membantu mengurus berkas saya ke Kantor Kependudukan”.*<sup>24</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Yustina dalam petikan wawancara berikut:

*Ya waktu saya mau ngurus berkas lagi untuk merubah berkas, saya datang ke kantor Desa, saya dikasih tahu tentang syarat- syarat pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, kemudian saya pulang kerumah, saya siapkan syarat-syaratnya dan besoknya ada aparat pemerintah Desa yang datang untuk mengambil syarat-syarat yang sudah saya lengkapi”.*<sup>25</sup>

Hal ini juga dibuktikan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di Desa Sidomekar, mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Sidomekar adalah sebagai petani atau pekebun, secara tidak langsung pada siang hari masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di kebun atau di sawah dan jika mereka kembali pada sore hari, maka jam pelayanan di kantor Desa telah usai. Namun dengan adanya kebijakan yang diberikan oleh aparat pemerintah Desa Sidomekar saat ini sangat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Jika dibandingkan pada saat sebelum pemekaran, masyarakat kini benar-benar merasakan kesederhanaan prosedur, pasalnya sebelum pemekaran masyarakat harus meluangkan cukup banyak waktu untuk dapat ke kantor Desa yang jaraknya tak

<sup>24</sup> Wawancara dengan Sumiati selaku Masyarakat Desa Sidomekar Tanggal 28 Mei 2018, jam 11.30 WIB di rumah ibu Sumiati.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Yustina Tanggal 29 Mei 2018, jam 12.00 WIB di rumah ibu Yustina selaku warga masyarakat Desa Sidomekar.

sedekat saat ini untuk bisa mendapatkan pelayanan aparat pemerintah.

## 2. Pelayanan Masyarakat

Jangka waktu pelayanan ialah tenggang waktu yang di butuhkan oleh aparat Desa untuk menyelesaikan proses pelayanan masyarakat seperti pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Dalam hal pelayanan publik, aparat pemerintah Desa hendaknya memberikan kepastian jangka waktu proses pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pasca pemekaran Desa diharapkan aparat pemerintah Desa mampu menyelesaikan pelayanan dengan waktu yang lebih cepat dan lebih baik. Beda halnya pada Desa Sidomekar yang belum mampu memberikan kepastian terhadap jangka waktu pelayanan pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Hal itu disebabkan karena tidak adanya kepastian waktu yang diberikan oleh Dinas Kependudukan kepada aparat pemerintah Desa Sidomekar dalam proses penyelesaian akta kelahiran dan kartu keluarga. Namun disisi lain, aparat pemerintah Desa Sidomekar telah mampu menyelesaikan proses pelayanan dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan pada saat sebelum pemekaran. Seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Dendi selaku sekretaris Desa Sidomekar dalam petikan wawancara berikut:

*Untuk pegurusan akta kelahiran dan kartu keluarga biasa memakan waktu satu minggu lebih, karena pada dasarnya tempat pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga itu berbeda jadi harus diselesaikan satu persatu. Kemudian lama atau tidaknya proses pengurusan itu*

*tergantung ada atau tidaknya Ibu Kepala Dinas, karena yang bertanda tangan pada akta kelahiran dan kartu keluarga adalah Kepala Dinas”.*<sup>26</sup>

Pendapat dari Bapak Dendi juga diperkuat dari pengakuan Ibu Susiyam yang sempat mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, *“waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, kurang lebih 2 minggu baru jadi. Lumayan cepat bila dibandingkan sebelum pemekaran dulu”.*

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Sumiati, *“waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga disini, kurang lebih 1 atau 2 minggu baru selesai semua. Tapi itu lebih cepat dari pada saat sebelum pemekaran dulu yang hampir 1 bulan baru jadi”.*

Selain itu, hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Rianti, *“Sebelum pemekaran dulu saya pernah mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, tapi saya lupa berapa lama baru jadi. Kemarin waktu saya urus di Kepala Desa, lima hari sudah jadi akta kelahiran dan kartu keluarga saya”.*<sup>27</sup>

Hasil wawancara di Desa Sidomekar menjelaskan bahwa, aparat pemerintah Desa belum mampu memberikan kejelasan kepada masyarakat masalah jangka waktu proses pelayanan akta kelahiran dan kartu keluarga. Namun disisi lain, aparat pemerintah Desa Sidomekar telah mampu mengubah jangka waktu pelayanan menjadi lebih cepat bila dibandingkan saat sebelum pemekaran. Hal itu merupakan sebuah dampak positif dari adanya sebuah pemekaran Desa.

### **3. Biaya atau Tarif**

Biaya atau tarif ialah ongkos yang harus di bayar masyarakat dalam pengurusan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 31 Ayat (1) menjelaskan bahwa biaya/ tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung Jawab negara

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan dendi. Loc.cit

<sup>27</sup> Wawancara dengan Rianti, loc. cit

dan/atau masyarakat. Di Desa Sidomekar, dalam hal pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, aparat pemerintah Desa Sidomekar tidak memungut biaya kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dendi dalam petikan wawancara berikut:

*“Di sini, untuk saya pribadi tidak memberikan tarif kepada masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, karena hal tersebut berkaitan dengan pungli. Disamping itu, jika ingin melakukan pungutan harus ada perdanya, dan perda itu masuk dalam APBD Desa”.*<sup>28</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ansar selaku Kaur Administrasi Desa Sidomekar dalam petikan wawancara berikut, *“kalo untuk masalah biaya, aparat pemerintah Desa Sidomekar tidak menentukan biaya atau tarif kepada masyarakat yang akan mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga”.*<sup>29</sup>

Namun hal yang berbeda diungkapkan oleh Ibu Yustina dalam petikan wawancara berikut, *“waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga dulu, saya mengeluarkan biaya sebanyak Rp.50.000”.*<sup>30</sup>

Senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Yustina, Ibu Susiyam juga mengungkapkan masalah biaya pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, *“Karena saya tidak bisa mengurus ke Kabupaten jadi saya minta tolong sama orang-orang di kantor Desa untuk kesana, waktu itu saya bayar Rp. 50.000 untuk pengganti bensin”.*<sup>31</sup>

Selain kedua pernyataan tersebut, terdapat pula pernyataan dari Ibu Rianti, *“saya membayar Rp. 100.000 saat saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga dulu kepada aparat yang menguruskan saya di Kependudukan, itu untuk transportasi ke Kabupaten”.*<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat di Desa Sidomekar, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya aparat

<sup>28</sup> Wawancara dengan Dendi, loc. cit

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ansar, loc. cit

<sup>30</sup> *Ibid*, Yustina

<sup>31</sup> Wawancara dengan Susiyam selaku masyarakat Desa Sidomekar Tanggal 29 Mei 2018, jam 13.00 WIB di rumah ibu Susiyem.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Rianti, loc. cit



pemerintah Desa Sidomekar tidak memungut biaya kepada masyarakat yang ingin mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, akan tetapi menurut pengamatan peneliti pada saat berada dilapangan bahwa mayoritas masyarakat Desa Sidomekar selalu mengandalkan aparat pemerintah untuk membawa berakas-berkas yang pengurusan Akta Kelahiran atau Kartu Keluarga yang telah lengkap ke Kabupaten. Dan karena hal itu pula, telah menjadi tradisi masyarakat memberikan ongkos pengganti kepada aparat yang membantu mereka membawa berkas ke Kabupaten hingga selesai.

#### **4. Sarana dan Prasarana**

Dalam pelayanan publik, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya pelayanan publik yang prima. Pasca pemekaran, fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Desa Sidomekar masih sangat terbatas seperti hanya tersedia satu unit komputer, kursi plastik dan meja kayu serta toilet umum. Meskipun demikian, masyarakat Desa Sidomekar tetap merasa nyaman dan memaklumi kondisi kantor Desa tersebut akibat pasca pemekaran. Disamping itu, pada dasarnya masyarakat Desa Sidomekar sangat jarang untuk berkunjung ke kantor Desa sekalipun ingin memerlukan pelayanan aparat pemerintah Desa Sidomekar.

Kurangnya sarana dan prasarana di kantor Desa Sidomekar diungkapkan oleh Bapak Dendi selaku Sekretaris Desa Sidomekar dalam petikan wawancara berikut:

*Sarana dan prasarana Desa pasca pemekaran. Untuk sarana dan prasarana dikantor Desa, kami telah memiliki perangkat komputer*

*untuk melayani keperluan masyarakat, namun untuk fasilitas yang ada didalam kantor Desa sendiri belum terlalu banyak terlihat hanya ada kursi dan meja, karena kantor Desa kami masih dalam proses pembenahan pasca pemekaran. Namun hal tersebut tidak mengganggu proses pelayanan aparat pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat”.*<sup>33</sup>

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Dendi, Ibu Yustina juga memaparkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Kantor Desa Sidomekar dalam petikan wawancara berikut, *“saya pernah ke Kantor Desa Sidomekar, kalau kantor Desa Sidomekar itu fasilitas yang saya lihat hanya ada kursi, meja dan gambar-gambar. Mungkin karena sedang diperbaiki jadi masih terbatas fasilitasnya”.*<sup>34</sup>

Sependapat dengan pendapat Ibu Yustina, Ibu sumiati juga mengungkapkan sarana dan prasarana kantor Desa Sidomekar dalam petikan wawancara berikut, *“kalau saya lihat, sementara inikan kantor Desa disini sedang dalam proses pembangunan, jadi yang ada hanya meja dan kursi dan itu bisa dimaklumi.”*<sup>35</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Rianti dalam petikan wawancara berikut, *“saya pernah ke kantor Desa Sidomekar saat saya mengambil sembako, dan saya melihat ada kursi dan meja kayu. Lumayan nyamanlah tempatnya, karena masih diperbaiki juga”.*<sup>36</sup>

Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana di Kantor Desa Sidomekar telah diakui oleh beberapa masyarakat yang pernah datang ke kantor Desa. Fasilitas yang seharusnya dapat mendukung tercapainya proses pelayanan publik yang baik, justru kurang memadai. Semua itu dikarenakan saat ini Desa Sidomekar masih dalam masa pembangunan pasca pemekaran dan hal tersebut dapat dimaklumi oleh masyarakat Desa Sidomekar. Akan tetapi, pada sisi kesehatan dampak positif yang nampak adalah munculnya fasilitas kesehatan Pusat Kesehatan Terpadu (Pustu) yang dulunya saat sebelum dimekarkan belum ada di Desa

<sup>33</sup> Wawancara dengan Dendi, loc. cit

<sup>34</sup> Wawancara dengan Yustina, loc. cit

<sup>35</sup> Wawancara Sumiati, loc.cit

<sup>36</sup> Wawancara dengan Rianti, loc. cit

Sidomekar.

## 5. Kompetensi Pelaksana

Salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan publik di kantor Desa Sidomekar menjadi pelayanan prima, kompetensi pelaksana yakni kecakapan dan keramahan aparat pemerintah kantor Desa Sidomekar yang baik menjadi salah satu indikator yang turut mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Kecakapan dan keramahan aparat pemerintah kantor Desa Sidomekar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dari kehandalan, kemampuan dan tingkah laku aparat dalam merespon setiap pelayanan yang akan ataupun tengah dilakukan oleh masyarakat. Sejak dimekarkan dari Desa induk, Desa Sidomekar selalu berusaha memperbaiki kualitas aparat pemerintah kantor Desa Sidomekar dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun dengan penuh keterbatasan. Hal ini dibuktikan dengan kecakapan aparat pemerintah Desa yang menggunakan sistem jemput bola pada masyarakat yang ingin memerlukan pelayanan aparat pemerintah. Pasca dimekarkan dari Desa Induk, secara tidak langsung Desa Sidomekar memiliki sumber daya manusia baru yang sejatinya belum memiliki pengalaman dalam melayani masyarakat. Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Dendi selaku Sekretaris Desa Sidomekar dalam petikan wawancara berikut:

*Terus terang saja, disini sumber daya manusiannya masih kurang. Saya juga kurang tahu bagaimana program program dari atas,*

*seharusnya itu aparat Desa baru di tata, karena pada dasarnya mereka belum pernah mengadakan pelatihan sebelumnya. Seharusnya mereka dilatih agar mereka juga mempunyai ilmu dan pengetahuan. Akan tetapi, apapun yang saya tahu selama ini saya beri tahu kepada mereka agar mereka bisa sambil belajar. Dan setau saya yang dilatih diatas selama ini adalah ketua BPD, Kepala Desa dan Sekertaris Desa. Namun untuk masalah keramahan, aparat pemerintah Desa Sidomekar sangat ramah kepada masyarakat.”<sup>37</sup>*

Meskipun menurut pengakuan Bapak Dendi selaku Sekertaris Desa Sidomekar, kecakapan aparat Kantor Desa Sidomekar masih kurang karena belum adanya pelatihan khusus yang dilakukan oleh para aparat pemerintah, namun tak bisa dipungkiri keramahan dan kesopanan aparat dalam melayani masyarakat telah dirasakan dengan baik oleh masyarakat selama ini. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Susiyam dalam petikan wawancara berikut: *“sikap aparat selama ini kepada saya sangat baik, ramah dan mereka selalu cepat dalam melayani saya”*.<sup>38</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sumiati, *“sikapnya aparat baik, pada saat saya datang kesana saya langsung ditanya-tanya keperluan saya, tidak ada yang sombong dan cepat semua dalam bekerja”*.<sup>39</sup>

Tak jauh berbeda, Ibu Rianti juga mengungkapkan hal yang sama, *“pak sekdes selama ini sangat baik pada saya, ramah sekali”*.<sup>40</sup>

Terlihat dari hasil pengamatan, bahwasannya kompetensi pelaksana merupakan salah satu hal yang penting dalam pelayanan masyarakat. Di Desa Sidomekar sendiri khususnya, meskipun pengetahuan dan ilmu

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Dendi, loc. cit

<sup>38</sup> Wawancara dengan Susiyam, loc. cit

<sup>39</sup> Wawancara dengan Sumiati, loc. cit

<sup>40</sup> Wawancara dengan Rianti, loc. cit



aparatus pemerintah Desa Sidomekar masih kurang karena merupakan sumber daya manusia baru pasca dimekarkan dan tidak adanya pelatihan dari pusat kepada aparatus pemerintah Desa Sidomekar, namun hal tersebut tidak membatasi aparatus dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Terbukti, selama ini masyarakat merasa bahwa aparatus telah berkerjasama dengan cakap, baik dan ramah kepada masyarakat saat berkomunikasi. Sehingga masyarakat merasakan pelayanan yang lebih baik pasca pemekaran.



## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### **A. perubahan Yang Terjadi Di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawasng**

##### **1. Sistem dan Perosedur**

###### **a. Sebelum Pemekaran**

Keadaan Desa saat masih menginduk dengan Desa Sidomukti dan Desa Makartitama masyarakat yang akan mengurus suatu pemberkasan, masyarakat merasa kurang puas dengan sitem dan prosedur yang agak memberatkan masyarakat selaku masyarakat desa,

Sistem dan perosedur di desa induk sudah sesuai dengan undang undang yang mana dalam pengurusan surat-surat harus di laksanakan di kantor desa tanpa terkecuali dan tidak ada dispensasi kepada warganya terkadang dengan luasnya wilayah serta banyaknya jumlah penduduk yang mengurus akta kelahiran dan surat surat lainnya tak jarang dalam pengurusan selesai sehari terkadang memakan waktu yang berhari hari di karnakan banyaknya jumlah penduduk serta jauh nya penduduk dari kantor desa.sehingga memberatkan masyarakat selaku masyarakat desa,di tambah lagi kurang nya sosialisai terhadap waraga tentang pengurusan akta kelahiran dan surat surat lainnya sehinga terkadang masyarakat bingung dan bisa memakan waktu berhari hari karna berkas ny kurang lengkap.

### **b. Sesudah Pemekaran**

Prosedur merupakan sistem kerja aparat pemerintah Desa Sidomekar aparat Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sebuah pelayanan, kesederhanaan prosedur merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena hal tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Kesederhanaan prosedur yang diberikan aparat pemerintah Desa Sidomekar kepada masyarakat dapat terlihat dari cara aparat pemerintahan memberi pelayanan kepada masyarakat yang tidak mengenal tempat. Masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga tidak harus datang ke kantor Desa, karena aparat pemerintah Desa Sidomekar juga menerima dengan baik masyarakat yang datang kerumah Kepala Desa dan Sekretaris Desa meskipun telah diluar jam kerja. Selain itu, aparat pemerintah Desa Sidomekar juga selalu siap untuk membantu masyarakat membawa kelengkapan syarat-syarat pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga ke kantor kependudukan, oleh karena itu masyarakat tidak perlu lagi bersusah payah menuju ke kantor kependudukan.

## **2. Pelayanan Masyarakat**

### **a. Sebelum Pemekaran**

Jangka waktu pelayanan sebelum pemekaran desa yakni berkaitan dengan tenggang waktu yang di butuhkan oleh aparat Desa untuk menyelesaikan proses pelayanan masyarakat seperti

pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Dalam hal pelayanan publik, aparat desa sering kali tidak memberikan jangka waktu proses pelayanan yang tidak tepat waktu kepada masyarakat.

Meskipun Untuk pegurusan akta kelahiran dan kartu keluarga biasa memakan waktu satu minggu lebih, karena pada dasarnya tempat pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga itu berbeda jadi harus diselesaikan satu persatu. Namun hal itu tidak ada penjelasan dan keterangan yang disampaikan oleh pihak aparat Desa sehingga masyarakat merasa bingung dan enggan untuk melakukan pengurusan berkas-berkas tersebut.

#### **b. Sesudah Pemekaran**

Jangka waktu pelayanan yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan oleh aparat Desa untuk menyelesaikan proses pelayanan masyarakat seperti pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Beda halnya pada Desa Sidomekar yang belum mampu memberikan kepastian terhadap jangka waktu pelayanan pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Hal itu disebabkan karena tidak adanya kepastian waktu yang diberikan oleh Dinas Kependudukan kepada aparat pemerintah Desa Sidomekar dalam proses penyelesaian akta kelahiran dan kartu keluarga. Namun disisi lain, aparat pemerintah Desa Sidomekar telah mampu menyelesaikan proses pelayanan dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan pada saat sebelum pemekaran. Seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Dendi selaku sekretaris Desa Sidomekar



Untuk pegurusan akta kelahiran dan kartu keluarga biasa memakan waktu satu minggu lebih, karena pada dasarnya tempat pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga itu berbeda jadi harus diselesaikan satu persatu. Kemudian lama atau tidaknya proses pengurusan itu tergantung ada atau tidaknya Ibu Kepala Dinas, karena yang bertanda tangan pada akta kelahiran dan kartu keluarga adalah Kepala Dinas.

### **3. Biaya atau Tarif**

#### **a. Sebelum pemekaran**

Pada saat belum terjadi pemekaran, dalam hal pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, aparat pemerintah Desa juga tidak memungut biaya kepada masyarakat. Namun kesadaran dari masyarakat yang memberikan ongkos jasa yang biasanya di berikan yakni berjumlah 50.000 untuk pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, di karnakan jarak tempuh jalan yang jauh dan ada pula masyarakat yang memberikan uang jasa sampai seratus 100 000 di karnakan masyarakat memandang jauh dan sulit nya jalan menuju pengurusan berkas atau dokumen masyarakat.

#### **b. Sesudah Pemekaran**

Di Desa Sidomekar, dalam hal pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, aparat pemerintah Desa Sidomekar tidak memungut biaya atau tarif kepada masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga namun seperti pengurusan seperti hal nya dokumen dan kartu keluaraga biasanya masyarakat tidak mau mengurus sendiri sehingga

meminta bantuan kepada aparat pemerintahan Desa untuk mengurusinya dan masyarakat biasanya memberikan uang pengganti bensin yang tidak di patok besar nya uang namun bbiasanya masyarakat memberikan uang pengganti bensin senilai 50.000 paling besar.

#### **4. Sarana dan Prasaran**

##### **a. Sebelum Pemekaran**

Dalam pelayanan publik, belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya pelayanan publik yang prima. Sebelum pemekaran, fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Sidomekar masih sangat terbatas karena saat itu Desa Sidomekar terletak di ujung Desa segala fasilitas yang berkenaan dengan kantor Desa masih berada pada kantor Desa induk jika dilihat dalam hal kesehatan sebelum terjadi pemekaran belum memiliki Pustu (pusat kesehatan terpadu). Untuk sarana dan prasarana dalam melayani keperluan masyarakat semua masih terpusat pada Desa induk. Dan tentu saja keterbatasan semua itu berdampak pada terganggunya proses pelayanan aparat pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat. Selai pusat kesahatan terpadu akses jalan juga saat belum terjadi pemekaran masih kurang baik ya mklum di kernakan letak saat itu desa sidomekar terletak di ujung Desa Sidomukti dan Makartitama.

### **b. Sesudah Pemekaran**

Dalam pelayanan publik, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya pelayanan publik yang prima. Pasca pemekaran, fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Desa Sidomekar masih sangat terbatas seperti hanya tersedia satu unit komputer, kursi plastik dan meja kayu serta toilet umum. Meskipun demikian, masyarakat Desa Sidomekar tetap merasa nyaman dan memaklumi kondisi kantor Desa tersebut akibat pasca pemekaran. Disamping itu, pada dasarnya masyarakat Desa Sidomekar sangat jarang untuk berkunjung ke kantor Desa sekalipun ingin memerlukan pelayanan aparat pemerintah Desa Sidomekar.

Kurangnya sarana dan prasarana yakni di maklumi masyarakat di kantor Desa Sidomekar merupakan masih tahap pembangunan sehingga masih dalam tahap penyempurnaan.

Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana di Kantor Desa Sidomekar telah diakui oleh beberapa masyarakat yang pernah datang ke kantor Desa. Fasilitas yang seharusnya dapat mendukung tercapainya proses pelayanan publik yang baik, justru kurang memadai. Semua itu dikarenakan saat ini Desa Sidomekar masih dalam masa pembangunan pasca pemekaran dan hal tersebut dapat dimaklumi oleh masyarakat Desa Sidomekar. Akan tetapi, pada sisi kesehatan dampak positif yang nampak adalah munculnya fasilitas kesehatan Pusat Kesehatan Terpadu (Pustu) yang dulunya saat sebelum dimekarkan belum ada di

Desa Sidomekar. serta jalan yang tadinya sulit dilalui masyarakat setelah pemekaran desa jalan yang tadinya masih tanah sekarang sudah di batu dan mulai di aspal.

## **5. Kompetensi Pelaksana**

### **a. Sebelum Pemekaran**

Berkenaan dengan kompetensi pelayanan desa sidomekar sebelum pemekaran, kecakapan aparat Kantor Desa Sidomukti sudah sangat baik dan mumpuni, namun tak bisa dipungkiri keramahan dan kesopanan aparat dalam melayani masyarakat masih kurang baik, hal itu kami menyadari bahwa besar kemungkinan karena adanya jarak daerah yang berpengaruh kepada sikap sosial para aparat Desa induk terhadap kami selaku desa yang berada di bawah naungan mereka. Karena secara sosial tentu saja masyarakat Desa Sidomekar sangat jarang untuk berintraksi langsung dengan masyarakat yang ada di Desa induk kala itu Desa Sidomukti dan Makar Titama

### **b. Sesudah Pemekaran**

Di Desa Sidomekar kompetensi pelaksana merupakan salah satu hal yang penting dalam pelayanan masyarakat. Di Desa Sidomekar sendiri khususnya, meskipun pengetahuan dan ilmu aparat pemerintah Desa Sidomekar masih kurang karena merupakan sumber daya manusia baru pasca dimekarkan, dan tidak adanya pelatihan dari pusat kepada aparat pemerintah Desa Sidomekar, namun hal tersebut tidak membatasi aparatur Desa dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.



Terbukti, selama ini masyarakat merasa bahwa aparat Desa telah berkerja dengan cakap, baik dan ramah kepada masyarakat saat berkomunikasi. Sehingga msyarakat merasakan pelayanan yang lebih baik pasca pemekaran.

## **B. Dampak pemekaran Desa Bagi Masyarakat Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang**

### **1. Sistem, Perosedur, Jangka Waktu, Dan Biaya Atau Tarif.**

Dengan adanya pemekaran desa di Desa Sidomekar sistem dan prosedur pengurusan berkas ke kantor desa menjadi lebih mudah sekaligus memutus kesulitan yang dialami masyarakat desa. Masyarakat desa tidak lagi harus meluangkan waktu pekerjaannya untuk mengurus berkas ke kantor desa, dengan prosedur yang sederhana dan sistem jemput bola yang diterapkan aparat desa Sidomekar serta ada kebijakan yang dilakukan oleh aparatur desa.

Tentu saja hal diatas juga secara otomatis mengurangi biaya yang harus di keluarkan untuk mengurus berkas. Karena masyarakat tidak harus mengurus ke kantor desa induk yang jaraknya cukup jauh.

Dalam pengurusan suatu berkas, jangka waktu pelayanan menjadi salah satu hal penting. Dengan adanya pemekaran desa di Desa Sidomekar jangka waktu dalam pengurusan menjadi lebih cepat. Hal ini dikarenakan terjadi beberapa perubahan yang signifikan dalam pelayanan kepada masyarakat oleh aparat dan kantor desa

Setelah mengalami pemekaran desa, rasio masyarakat yang akan mengurus berkas dengan jumlah pegawai di kantor desa menjadi cukup seimbang. Ditambah dengan pelayanan yang dilakukan dengan sistem jemput bola mengakibatkan tidak menyita waktu yang cukup banyak bagi masyarakat karena sebelumnya harus dilakukan di kantor desa sekarang bisa di rumah kepala desa atau di rumah sekretaris desa.

Untuk biaya dan tarif dalam pelayanan oleh aparatur desa, aparatur Desa Sidomekar tidak mematok tarif dalam pengurusan surat atau dokumen tetapi terkadang ada masyarakat yang biasanya memberikan uang pengganti bensin yang diberikan kepada aparat pemerintahan yang mengurus surat-surat tersebut namun dengan adanya pemekaran desa akses jalan menjadi mudah sehingga paling banyak masyarakat memberikan uang hanya 50,000 yang tadinya paling besar masyarakat memberikan sampai 100,000 karena akses jalan yang kurang bagus namun untuk masalah biaya inisiatif masyarakat sendiri.

## **2. Sarana, Prasarana, dan Kompetensi Pelaksana**

Sarana dan prasarana di Desa Sidomekar sudah lebih baik, yang tadinya saat berada di Desa induk belum ada sarana dan prasarana setelah mengalami pemekaran maka sudah ada namun masih belum lengkap karena masih tahap pembangunan, namun hal yang paling menonjol dengan adanya pemekaran yakni tersedianya pusat pelayanan terpadu sehingga memudahkan masyarakat dalam keluhan kesehatan, serta akses jalan yang sudah mulai bagus karena yang sebelum

pemekaran jalan masih tanah namun setelah pemekaran sudah di batu dan sebagian di aspal.

Dalam hal kompetensi pelaksanaan aparatur pemerintahan Desa Sidomekar, meskipun pengetahuan dan ilmu aparat pemerintah Desa Sidomekar masih kurang karena merupakan sumber daya manusia baru pasca dimekarkan, dan tidak adanya pelatihan dari pusat kepada aparat pemerintah Desa Sidomekar, namun hal tersebut tidak membatasi aparatur Desa dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Terbukti, selama ini masyarakat merasa bahwa aparat Desa telah berkerja dengan cakap, baik dan ramah kepada masyarakat saat berkomunikasi. Sehingga masyarakat merasakan pelayanan yang lebih baik pasca pemekaran.

### **C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap dampak pemekaran Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang**

Tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai sistem perosedur, jangka waktu pelayanan, biaya atau tarif, sarana dan perasarana, serta kompetensi pelaksanaan.

Di Desa Sidomekar sendiri, prosedur yang diterapkan oleh aparat pemerintah menjadi salah satu contoh dari apa yang disebut kesederhanaan prosedur. Kesederhanaan prosedur yang diberikan aparat pemerintah Desa Sidomekar kepada masyarakat berupa mudahnya sistem komunikasi antara

aparat terhadap masyarakat yang dapat dilakukan dimanapun tanpa harus secara formal datang ke kantor desa meskipun diluar jam kerja aparat pemerintah.

Hal ini merupakan sebuah kebijakan yang diberikan aparat pemerintah Desa Sidomekar kepada masyarakat yang ingin melakukan pelayanan publik seperti mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga dan tentunya kebijakan ini mendapat respon yang positif dari masyarakat karena pada akhirnya akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang tidak berbelit-belit. .

Berdasarkan prosedur yang di terapkan oleh aparat Desa Sidomekar dengan asas kesederhanaan dalam pelayanan tentunya telah sesuai dengan apa yang tuang dalam piagam Madinah. J. Suyuthi Pulungan, yang mengatakan terdapat empat belas prinsip yang berhubungan dengan pemerintahan dalam piagam madinah tersebut, yaitu : prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip umat, prinsip kebebasan, prinsip hubungan umat antar beragama, prinsip tolong menolong, dan membela yang teraniaya, prinsip hidup bertetangga, prinsip perdamaian, prinsip pertanian, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip kepemimpinan, dan prinsip ketaqwaan.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas kiranya tidaklah jauh berbeda pandangan bila kita melihat dari hukum Undang-undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaanya pasal 8 ayat 1 bahwa ada

---

<sup>1</sup> Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah dari Pandangan Quran*.h. 121.



keharusan yang dipenuhi sebelum terjadinya pemekaran yaitu sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik.

Di Desa Sidomekar, aparat pemerintah belum mampu memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat dikarenakan dalam proses pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga banyak pihak yang terlibat. Bukan hanya aparat pemerintah desa, akan tetapi juga melibatkan pihak yang ada di kecamatan, dan kabupaten untuk menyelesaikan satu akta kelahiran dan kartu keluarga. Namun dilain pihak pihak masyarakat telah merasa puas dengan adanya penjelasan atau keterangna dari pihak perangkat Desa tentang jangka waktu pengurusan yang berakibat masyarakt tidak merasa ragu dan bingung tentang kepastian tentang apa yang mereka urus.

Mengenai biaya, pada dasarnya aparat pemerintah tidak menentukan atau mengenakan biaya kepada masyarakat yang ingin melakukan pelayanan publik. Namun tak jarang masyarakat juga mengeluarkan ongkos pada saat melakukan pengurusan pelayanan. Seperti halnya pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga akan dikenakan biaya sejumlah Rp. 50. 000 sampai dengan Rp. 100.000. Biaya ini dipergunakan untuk biaya transportasi bagi aparat pemerintah Desa Sidomekar yang membantu masyarakat mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga di Kantor Camat dan di Kantor Kependudukan di Kabupaten. Menurut pengakuan beberapa informan, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat saat ini lebih baik apabila dibandingkan pada saat Desa Sidomekar belum dimekarkan dari desa induk.

Berkenaan dengan pembiayaan dan tarif di atas secara hukum Islam berdasarkan berdasarkan asas kerelaan dan bersifat tolong menolong, maka bila kita merujuk pada piagam madinah tidaklah ada permasalahan dilamanya, namunlain halnya jika tidak ada asas kerelaan dan, atau dengan kata lain dana dia atas di tetapkan oleh aparat setempat maka akan bertentangan dengan hukum islam maupun hukum Positif sebagai mana Undang-undang berikut ini:

Biaya atau tarif ialah ongkos yang harus di bayar masyarakat dalam pengurusan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 31 Ayat (1) menjelaskan bahwa biaya/ tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung Jawab negara dan/atau masyarakat.

Pada Kantor Desa Sidomekar sendiri, ketersediaan sarana yang dibutuhkan belum sepenuhnya terpenuhi. Hanya terlihat meja, kursi dan fasilitas MCK yang telah tersedia di Kantor Desa Sidomekar. Hal ini disebabkan karena Kantor Desa Sidomekar saat ini sedang dalam proses pembangunan pasca pemekaran. Namun hal ini tidak menjadi halangan bagi masyarakat untuk mendapatkan kepuasan pelayanan dari aparat pemerintah Desa Sidomekar dan kenyamanan saat berada di Kantor Desa Sidomekar

Kompetensi pelaksana merupakan kemampuan yang dimiliki oleh aparat pemerintah Desa Sidomekar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan pelayanan publik yang baik. Kompetensi aparat dalam hal ini meliputi kecakapan, daya tanggap dan keramahan aparat pemerintah Desa Sidomekar selama proses pelayanan kepada masyarakat. Apabila dilihat dari sumber daya manusia, aparat pemerintah Desa Sidomekar merupakan Sumber

Daya Manusia yang baru terbentuk dan belum pernah melakukan pelatihan selama pasca pemekaran Desa. Namun kinerja aparat pemerintah Desa Sidomekar yang baik sangat dirasakan oleh masyarakat, hal ini menjadi salah satu bukti bahwa aparat pemerintah Desa Sidomekar selaku sumber daya manusia baru memiliki kecakapan dan daya tanggap yang handal meskipun tanpa adanya pelatihan dari pemerintah pusat. Selain kecakapan dan daya tanggap yang baik, aparat pemerintah Desa Sidomekar juga memiliki keramahan yang patut untuk dicontoh oleh aparat-aparat pemerintah lainnya.

Berdasarkan data di atas maka bila kita merujuk pada teori yang diungkapkan oleh Jaddiwi bahwa salah satu dampak positif dari pemekaran desa adalah tercapainya akses percepatan pelayanan masyarakat akan dapat semakin cepat, karena lebih dekat dengan masyarakat.<sup>2</sup> Kemudian demikian pula kaitanya bila merujuk pada hukum Islam yang merujuk pada isi piagam madinah dengan prinsip tolong menolong, keadilan dan kepemimpinan.<sup>3</sup> Oleh karena itu dapat kita pahami bahwa dampak pemekaran desa khususnya di desa Sidomekar dalam hal prosedur pelayanan dan kompetensi layanan di desa sidomekar telah sesuai dengan apa yang di amanatkan dan dianut dalam hukum tatanegara Islam dan positif.

Hal di atas diperkuata dengan isi piagam madinah bahwa pemerintah desa mempunyai beban amanah kekuasaan yang cukup tinggi. Sebagai pelaksana amanat tersebut pemerintah desa mempunyai tugas dan wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana tertera dalam alquran

---

<sup>2</sup> *Dampak Pemekaran Desa*, h. 21

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 33



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Perubahan yang terjadi setelah pemekaran**

Perubahan yang terjadi di desa Sidomekar yakni memberikan semangat kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan surat-surat serta akta kelahiran dikarenakan mudahnya pengurusan serta adanya sosialisasi terhadap masyarakat desa dan perosdur serta layanan lebih efesien karena jumlah penduduk desa yang seimbang sehingga pelayanan lebih cepat sehingga masyarakat puas dalam pelayanan.

##### **2. Dampak pemekaran desa Sidomekar terhadap masyarakat**

Dampak pemekaran desa Sidomekar dapat dilihat dalam beberapa aspek, dan kesemuanya merupakan perbandingan yang dirasakan masyarakat sebelum dan sesudah desa mengalami pemekaran.

Berdasarkan aspek Prosedur, Jangka Waktu pelayanan, dan Biaya atau Tarif, terjadi peningkatan yang sangat membantu masyarakat dalam kegiatan pengurusan berkas dan semacamnya terhadap aparat desa. Lalu berdasarkan Sarana dan Prasarana serta Kompetensi pelaksana menurut hasil penelitian, sarana dan prasarana di Desa Sidomekar telah mengalami peningkatan, seperti perbaikan dalam sarana transportasi yaitu jalan, dan pembangunan-pembangunan lainnya yang terjadi akibat



pemekaran desa, hal ini tentu saja tak lepas dari kompetensi pelaksana yang mumpuni dengan rasio yang sesuai karena pembagaian kewilayahan desa pasca pemekaran

Oleh karena itu dapat kita pahami bahawa dampak pemekaran desa khususnya di desa Sidomekar dalam hal prosedur pelayanan dan kompetensi layanan di desa sidomekar telah sesuai dengan apa yang di amanatkan dan dianut dalam hukum tatanegara Islam dan positif.

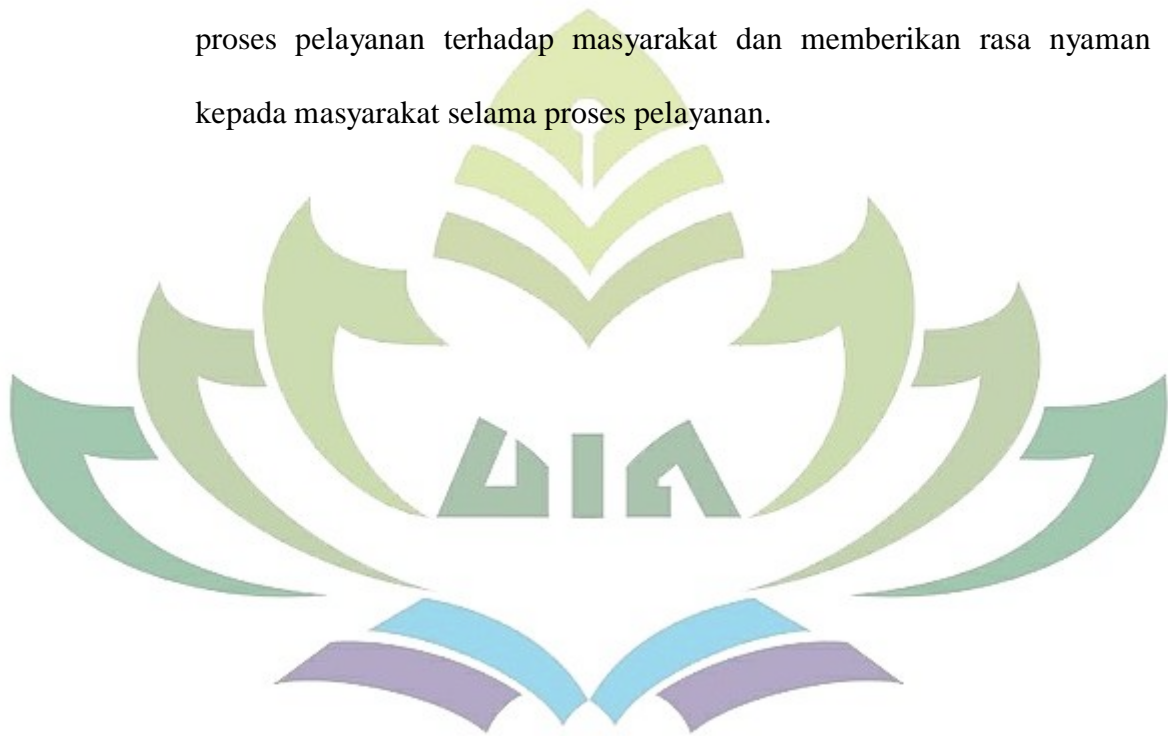
### 3. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dampak pemekaran desa Sidomekar.

Dalam pandangan hukum positif dampak pemekaran desa di Desa Sidomekar telah sesuai dengan undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa. Sedangkan dalam pandangan Hukum Islam, Dampak pemekaran bagi masyarakat desa di Desa Sidomekar sesuai dengan pandangan hukum islam, hal ini diperkuat dengan isi piagam madinah yang berkaitan dengan aparat desa selaku suksesor pemekaran desa, piagam tersebut senditi berisikan bahwa pemerintah dalam konteks ini adalah pemerintah desa mempunyai beban amanah kekuasaan yang cukup tinggi. Sebagai pelaksana amanat tersebut pemerintah desa mempunyai tugas dan wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana tertera dalam alquran surat an-nisa ayat 58.

### **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin memberikan rekomendasi saran- saran yang nantinya diharapkan dapat membantu aparat pemerintah

Desa Sidomekar untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih berkualitas kepada masyarakat, yaitu: Untuk sarana dan prasarana Kantor Desa Sidomekar, sebaiknya pemerintah Desa Sidomekar dapat sesegera mungkin melengkapi fasilitas- fasilitas sarana yang dibutuhkan di Kantor Desa Sidomekar serta dapat mengutamakan pembangunan gedung Kantor Desa agar sekiranya dapat digunakan untuk proses pelayanan terhadap masyarakat dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat selama proses pelayanan.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul godir ,Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014.

Arsip Dokumen Desa sidomekar, Observasi tanggal 20 Mei 2018,jam 10.00 WIB

Depag RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Elta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*, yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.

Fathurrahman Djami, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Dzajuli, H.A, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Subgyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Santoso, Lay, *Perjuangan Menuju Puncak*, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, 2006.

Makagansa, *Tantangan Pemekaran Daerah*, Yogyakarta: FusPad, 2008.

Maschab dalam Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015.

Murodi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta:Karya Toha Putra, 2000.

Jeddawi, Murtir, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta 1998.

Pulungan, Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah dari Pandangan Quran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Tim Bank Dunia dalam Tri, Ratnawati. *Pemekafran Daerah Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Jumat, Abd.Gani, *Konsep Pemerintahan dalam Alquran: Analisis Makna Khalifah Dalam Prespektif Fiqih Politik*. E-Journal IAIN Palu. Vol. 11, No. 1, Juni 2014.

<https://rubikbahasa.wordpress.com/2018/02/01/dampak/pemekaran/desa>.

Peraturan Pemerintah Nomor. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penggabungan Daerah pasal 14.

Sapi'i, *Dampak Pemekaran Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*, Volume 1 Nomor 1: 2-3, 2013.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Desa Sidomukti, Tanggal 26 Mei 2018, Jam 10.00.WIB

Wawancara dengan Bapak Dendi selaku Sekertaris Desa Sidomekar, Tanggal 26 Mei 2018, Jam 10.30, WIB.

Wawancara dengan Bapak Ansar selaku Kaur Administrasi, Tanggal 26 Mei 2018, Jam, 14.00. WIB.

Wawancara dengan Yustina selaku Masyarakat Desa Sidomekar Tanggal 26 Mei 2018, Jam, 14.25. WIB.

Wawancara dengan Susiyem selaku Masyarakat Desa Sidomekar, Tanggal 26 Mei 2018, Jam 15.00. WIB.

Wawancara dengan Rianti selaku Masyarakat Desa Sidomekar, Tanggal 26 Mei 2018, Jam 15.30, WIB

Wawancara dengan Sumiati selaku Masyarakat Desa Sidomekar, Tanggal 28 Mei 2018, Jam 11.30. WIB

Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2017.

